



LAPORAN KEUANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

- **BAGIAN ANGGARAN 077**
- **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**
TANGGAL 30 SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025



Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110, PO. Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000, Fax. (021) 352-0177

**LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2025**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Lampiran atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pengguna Anggaran/ Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk-166521444251024112429

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>LAPORAN KEUANGAN POKOK</u>	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran dan Daftar	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
II. Laporan Operasional	7
III. Laporan Perubahan Ekuitas	8
IV. Lampiran	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Dasar Hukum dan Peraturan	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Konstitusi RI	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	17
B. Informasi Keuangan Tertentu	29
B.1. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi	29
B.2. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi	29
B.3. Informasi Pagu Blokir	30
C. Informasi <i>Outstanding</i> Kontrak	32
C.1. Informasi <i>Outstanding</i> Kontrak	32
D. Informasi Penting Lainnya	35
D.1. Kondisi	35
D.2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/ Prioritas Nasional/ Program Utama	35
D.3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L	40
E. Data Capaian RO Per Fungsi dan Prioritas Nasional	41
E.1. Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN	41
E.2. Capaian Output Kegiatan (Prioritas Nasional)	45

LAMPIRAN

- A. Surat Hasil Rekonsiliasi bulan September 2025
- B. Laporan SAKTI
 - Neraca Percobaan Kas
 - LRA Pendapatan
 - LRA Belanja
 - Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal
 - Neraca Percobaan AkruaI
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Ekuitas
- C. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
- D. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bulan September 2025
- E. Memo Penyesuaian

LAMPIRAN DAN DAFTAR

I. DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 September 2025 dan 30 September 2024.....	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024	2
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6	Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi	29
Tabel 7	Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai Serta Rencana Mitigasi	30
Tabel 8	Informasi Pagu Blokir	30
Tabel 9	Informasi <i>Outstanding</i> Kontrak	32
Tabel 10	Informasi <i>Outstanding</i> Kontrak Signifikan	32
Tabel 11	Capaian Output Program Prioritas Nasional Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025	45

II. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012.....	14
Gambar 2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2019.....	14



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Triwulan III Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 30 September 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Lampiran atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 24 Oktober 2025
Inspektur,
Sigit Purnomo



Inspektur
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
mk-125637441251027095359

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Triwulan III Anggaran 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Lampiran atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pengguna Anggaran/ Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature

mk-166521444251024112815

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Komprehensif ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode *1 Januari s.d. 30 September 2025*.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp1.744.775.929,-** atau mencapai **56,08%** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp3.111.028.000,-**.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp548.303.661.162,-** atau mencapai **82,85%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp661.811.922.000,-**. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja netto yang diperoleh dari realisasi belanja bruto sebesar Rp548.439.323.704,- atau 82,87% dari pagu anggaran, dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp(135.662.542),- atau (0,02)% dari pagu anggaran. Jumlah Realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 September Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 September 2025 dan 30 September 2024

Uraian	30 September TA 2025			30 September TA 2024
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	3.111.028.000	1.744.775.929	56,08	1.806.137.558
Belanja Negara (Bruto)	661.811.922.000	548.439.323.704	82,87	482.408.014.006
Pengembalian Belanja	-	(135.662.542)	(0,02)	(696.039.287)
Belanja Negara (Netto)	661.811.922.000	548.303.661.162	82,85	481.711.974.719

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2025.

Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp877.787.232.627,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp15.932.055.274,-**; Aset Tetap (netto setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar **Rp848.711.190.991,-**; Properti Investasi (netto setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar **Rp9.905.333.511,-**; dan Aset Lainnya (netto setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar **Rp3.238.652.851,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp32.924.788.470,-** dan **Rp844.862.444.157,-**.

Ringkasan Neraca per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	30 September 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	15.932.055.274	4.595.069.745	11.336.985.529	246,72
Aset Tetap	848.711.190.991	871.017.473.718	(22.306.282.727)	(2,56)
Properti Investasi	9.905.333.511	10.020.511.808	(115.178.297)	(1,15)
Aset Lainnya	3.238.652.851	13.430.811.149	(10.192.158.298)	(75,89)
Jumlah Aset	877.787.232.627	899.063.866.420	(21.276.633.793)	(2,37)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	32.924.788.470	12.294.328.779	20.630.459.691	167,80
Jumlah Kewajiban	32.924.788.470	12.294.328.779	20.630.459.691	167,80
Ekuitas				
Ekuitas	844.862.444.157	886.769.537.641	(41.907.093.484)	(4,73)
Jumlah Ekuitas	844.862.444.157	886.769.537.641	(41.907.093.484)	(4,73)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	877.787.232.627	899.063.866.420	(21.276.633.793)	(2,37)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar **Rp1.178.209.216,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp581.922.086.765,-** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(580.743.877.549),-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp185.045.698,- dan Rp(0),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(580.558.831.851),-**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2024. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp886.769.537.641,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp(580.558.831.851),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi, lain-lain dan transaksi antar entitas senilai total Rp538.651.738.367,-, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai **Rp844.862.444.157,-**.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (FACE REPORT)

**PERBANDINGAN PERIODE
30 SEPTEMBER 2025
DAN
30 SEPTEMBER 2024**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	30 SEPTEMBER 2025			30 SEPTEMBER 2024
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3.111.028.000	1.744.775.929	56,08	1.806.137.558
JUMLAH PENDAPATAN		3.111.028.000	1.744.775.929	56,08	1.806.137.558
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	92.814.370.000	57.469.088.706	61,92	51.426.284.405
Belanja Barang	B.2.2	566.060.204.000	489.903.536.406	86,55	421.749.337.624
Jumlah Belanja Operasi		658.874.574.000	547.372.625.112	83,08	473.175.622.029
Belanja Modal	B.2.3				
Belanja Peralatan dan Mesin		1.166.344.000	698.073.196	59,85	4.921.147.616
Belanja Gedung dan Bangunan		245.000.000	166.535.174	67,97	987.059.700
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		195.000.000	-	-	-
Belanja Modal Lainnya		1.331.004.000	66.427.680	4,99	2.628.145.374
Jumlah Belanja Modal		2.937.348.000	931.036.050	31,70	8.536.352.690
JUMLAH BELANJA		661.811.922.000	548.303.661.162	82,85	481.711.974.719

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 27 Oktober 2025
Pengguna Anggaran/Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk105459122251024113956

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**NERACA
(FACE REPORT)**

**PERBANDINGAN PERIODE
30 SEPTEMBER 2025
DAN
31 DESEMBER 2024**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	JUMLAH	
		30 SEPTEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	12.656.825.486	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.2	530.610.942	856.618.430
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.3	-	39.179.179
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	164.753.425	84.402.845
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(709.173)	(23.763.818)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		164.044.252	60.639.027
Persediaan	C.1.6	2.580.574.594	3.638.633.109
JUMLAH ASET LANCAR		15.932.055.274	4.595.069.745
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	506.815.456.000	506.815.456.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	324.840.672.940	325.983.313.013
Gedung dan Bangunan	C.2.3	287.858.614.087	287.721.846.960
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	45.494.236.272	45.494.236.272
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	30.728.114.199	38.661.377.769
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	3.483.000	3.483.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(347.029.385.507)	(333.662.239.296)
JUMLAH ASET TETAP		848.711.190.991	871.017.473.718
PROPERTI INVESTASI	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	11.958.905.308	11.958.905.308
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(2.053.571.797)	(1.938.393.500)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		9.905.333.511	10.020.511.808
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	25.467.872.331	25.357.373.651
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	446.500.000	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	-	10.344.831.450
Aset Lain-lain	C.4.4	8.850.560.630	16.406.312.177
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.5	(31.526.280.110)	(38.677.706.129)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.238.652.851	13.430.811.149
JUMLAH ASET		877.787.232.627	899.063.866.420



URAIAN	CAT.	JUMLAH	
		30 SEPTEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	9.023.313.880	11.217.924.195
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	10.041.610.954	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	1.203.038.150	1.076.404.584
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	12.656.825.486	-
JUMLAH KEWAJIBAN		32.924.788.470	12.294.328.779
EKUITAS			
EKUITAS	C.6		
Ekuitas		844.862.444.157	886.769.537.641
JUMLAH EKUITAS		844.862.444.157	886.769.537.641
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		877.787.232.627	899.063.866.420

Jakarta, 27 Oktober 2025
Pengguna Anggaran/Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



LAPORAN OPERASIONAL (FACE REPORT)

**PERBANDINGAN PERIODE
30 SEPTEMBER 2025
DAN
30 SEPTEMBER 2024**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	JUMLAH	
		30 SEPTEMBER 2025	30 SEPTEMBER 2024
1	2	3	4
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.178.209.216	1.444.756.723
JUMLAH PENDAPATAN		1.178.209.216	1.444.756.723
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	62.724.871.637	55.968.475.253
Beban Persediaan	D.2.2	2.797.145.392	2.906.066.969
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	494.487.365.279	392.577.636.907
Beban Pemeliharaan	D.2.4	3.478.279.139	8.843.008.818
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.718.237.667	24.723.146.758
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	-	741.501
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	15.715.783.196	15.367.295.256
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	404.455	80.306.702
JUMLAH BEBAN		581.922.086.765	500.466.678.164
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(580.743.877.549)	(499.021.921.441)
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	D.4		
Surplus dari Pelepasan Aset		128.977.000	810.379.873
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		56.068.698	364.035.953
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		185.045.698	1.174.415.826
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(580.558.831.851)	(497.847.505.615)
SURPLUS (DEFISIT) LO	D.5	(580.558.831.851)	(497.847.505.615)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 27 Oktober 2025
Pengguna Anggaran/Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk-30237053251027110008

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (FACE REPORT)

**PERBANDINGAN PERIODE
30 SEPTEMBER 2025
DAN
30 SEPTEMBER 2024**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	JUMLAH	
		30 SEPTEMBER 2025	30 SEPTEMBER 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	886.769.537.641	886.568.911.912
SURPLUS (DEFISIT) - LO	E.2	(580.558.831.851)	(497.847.505.615)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	70.330.400
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	(12.224.986)	(139.700.857)
JUMLAH		(12.224.986)	(69.370.457)
LAIN-LAIN	E.4	-	23.102.094
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	538.663.963.353	480.398.527.843
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(41.907.093.484)	(17.495.246.135)
EKUITAS AKHIR	E.6	844.862.444.157	869.073.665.777

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, 27 Oktober 2025
Pengguna Anggaran/Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk-166521444251024114430

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III
TA 2025**



PENJELASAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM DAN PERATURAN

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

*Dasar
Hukum dan
Peraturan*

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.05/2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017;
32. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-208/PB/2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2025.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi berdiri sejak 13 Agustus 2003 yang terbentuk dari hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*Profil dan
Kebijakan
MK*

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi melalui pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Mahkamah Konstitusi dalam upaya melaksanakan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 – 2029. Mahkamah Konstitusi berkomitmen dengan Visi:

“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan upaya-upaya terpadu dan sistematis yang dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

Dalam kaitan dengan usaha pencapaian Visi dan Misi, Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif serta Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi 2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
2.	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi 3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi 4. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi 5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi 6. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan dikuasakan dari Presiden

kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b, bahwa:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan”.

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa: “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi”.

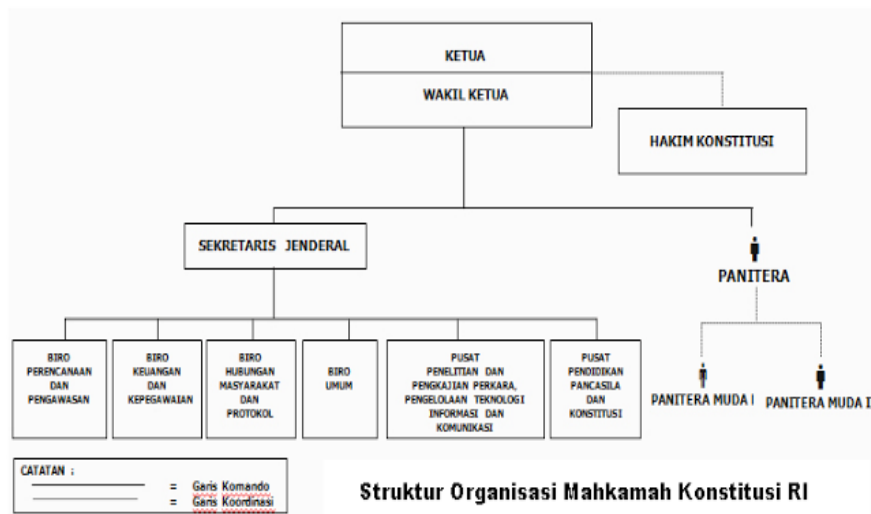
Demi memberikan jaminan akan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menyelenggarakan dukungan dan layanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum kepada Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 17 Juli 2017, pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Tugas-tugas teknis administratif diatur secara rinci pada Pasal 11 ayat (3):

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- e. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
- f. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
- g. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

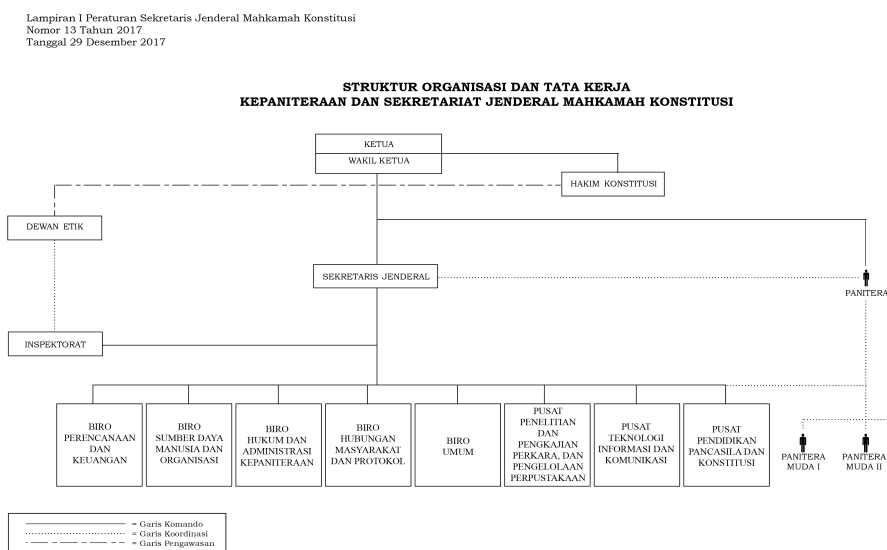
Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, seperti pada bagan (gambar 1) berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012



Kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, seperti pada bagan (gambar 2) berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Konstitusi
berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017



Pada Pasal 23 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur bahwa Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Secara rinci pada Pasal 26 diatur bahwa penyusunan laporan merupakan tugas Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan yang merupakan salah satu unit eselon IV di bawah Bagian Keuangan.

Terkait Pengelolaan Barang Milik Negara, pada Pasal 75 diatur bahwa terdapat 2 Sub Bagian yang terlibat dalam pengelolaannya, yaitu Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara yang mempunyai tugas pengelolaan perlengkapan, penyusunan analisis kebutuhan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara, dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara mempunyai tugas pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan barang milik negara. Dua Sub Bagian tersebut berada di bawah eselon III Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi.

*Pendekatan
Penyusunan
LK*

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini merupakan Laporan Keuangan yang terdiri dari satu Satuan Kerja yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Penyusunan Laporan Keuangan menjadi kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan, sementara penyusunan Laporan Barang Milik Negara merupakan kewenangan Biro Umum. Reviu dilakukan atas Laporan Keuangan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Mahkamah Konstitusi RI.

Sejak Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan. Pada aplikasi SAKTI, modul Akuntansi dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan Laporan Keuangan. Modul Asel Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan.

Perubahan mendasar pada Aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat *open-closing* periode untuk melakukan buka-tutup periode pada saat periode transaksi

dinyatakan berakhir. Sebelum melakukan tutup buku, operator Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan validasi seluruh transaksi dan melakukan *posting* jurnal yang timbul dari modul terkait lainnya (Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang). Pada *closing* periode Modul Akuntansi dan Pelaporan, secara otomatis modul lainnya tutup buku pada periode yang sama. Periode akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

SAI terdiri dari Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Piutang, Modul Aset Tetap, dan Modul Persediaan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Modul Akuntansi dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional serta Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.4. BASIS AKUNTANSI

Mahkamah Konstitusi menerapkan Sistem Akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis
Akuntansi*

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan.

*Dasar
Pengukuran*

Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan menganut prinsip nilai perolehan historis, terhadap aset-aset yang tidak dapat diperoleh nilai historisnya menggunakan nilai wajar. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

*Kebijakan
Akuntansi*

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

*Pendapatan-
LRA*

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

*Pendapatan-
LO*

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Ruang Gedung Kantor, Sewa Gedung Serbaguna dan Sewa Rumah Dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga.
- Pendapatan atas Penjualan Aset Tetap yang telah Dihapuskan diakui pada saat diterima dokumen penyetoran kepada Kas Negara dan SK Penghapusan BMN.
- Pendapatan atas pelunasan TGR diakui pada saat SKTJM atau SK Sekretaris Jenderal ditandatangani.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset (a.l beban persediaan); terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (a.l beban penyusutan).

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset***a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, bagian lancar piutang, dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Bagian Lancar Piutang adalah piutang yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Bagian lancar piutang dapat timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan perikatan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), di mana persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

Aset Tetap

- nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Mahkamah Konstitusi didukung dengan sarana rumah negara untuk tempat tinggal Hakim Konstitusi dan Gedung Kantor yang merupakan milik Kementerian Sekretariat Negara. Selama dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi biaya pemeliharaan dan renovasi menjadi tanggung jawab dan beban anggaran belanja Mahkamah Konstitusi. Terkait Aset Tetap Renovasi (ATR) Mahkamah Konstitusi taat sesuai ketentuan yaitu Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya. Apabila sampai dengan akhir tahun, biaya renovasi rumah negara tersebut belum diserahkan/dihibahkan ke Kementerian Sekretariat Negara, maka Mahkamah Konstitusi menyajikan Aset Tetap Renovasi pada kelompok Aset Tetap di neraca Mahkamah Konstitusi.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai dari perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap disajikan dalam Akumulasi Penyusutan. Nilai Akumulasi Penyusutan terdiri dari penyusutan regular yang terjadi setiap akhir semester dan penyusutan transaksional (a.l transfer masuk/transfer keluar, koreksi, reklas masuk/reklas keluar, dan penghapusan).

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TP/TGR.

e. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

*Properti
Investasi*

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;

atau

- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

f. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi ATB dilaksanakan tiap semester dan disajikan sebagai beban amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan dan akumulasi amortisasi dalam neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kebijakan amortisasi pada Mahkamah Konstitusi mengacu pada PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Amortisasi Aset Tak Berwujud di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Ekuitas pada Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh Surplus/defisit Laporan Operasional, koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan transaksi antar entitas. Surplus/defisit Laporan Operasional adalah perhitungan selisih antara pendapatan dan beban pada Laporan Operasional.

Ekuitas

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi adalah koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang terjadi antara Satker dengan Kuasa BUN.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

*Rekening
Penampungan
Akhir Tahun
Anggaran
(RPATA)*

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Melalui RPATA

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima di mana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Mekanisme RPATA digunakan untuk menampung pembayaran pekerjaan kontraktual (termasuk swakelola) dan non-kontraktual darurat bencana dengan BAST tanggal 21-31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan dilanjutkan di Tahun Anggaran berikutnya. Mekanisme pelaksanaan anggaran melalui RPATA terdiri dari pengajuan SPM Penampungan, Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dan pengajuan SPM Penihilan.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP-Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan. Dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

2. Pembayaran Kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM-Pembayaran.

1. Pekerjaan Selesai 100%

- PPK dan Penyedia membuat BAST untuk pekerjaan yang telah selesai 100% sampai 31 Desember.
- Berdasarkan BAST, PPK membuat SPP-Pembayaran kepada rekening Penyedia dengan akun pengeluaran non anggaran (82xxxx) pada sisi pengeluaran, dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya pada sisi penerimaan.
- Jika SPP yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM sesuai tanggal aktual.
- PPSPM mengajukan SPM-pembayaran kepada KPPN paling cepat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal SP2D-penampungan terbit dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAST.
- Terhadap SPM-pembayaran yang memenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan SPPT.
- Atas penerbitan SPPT, Direktorat PKN melakukan PPR sebagai dasar penerbitan SP2D-pembayaran.
- Atas penerbitan SP2D-pembayaran, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan dropping dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.
- Atas penyaluran dana ke rekening penyedia, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN paling lama 3 (tiga) hari kerja.

2. Pekerjaan Tidak Selesai dan Diberikan Kesempatan ke TA Berikutnya

Pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir TA dapat diberikan kesempatan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sepanjang:

1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
2. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan di kertas bermaterai:
 - kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
 - kesediaan untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Kriteria dapat dilanjutkan sampai 90 (sembilan puluh) hari ke TA berikutnya:

1. Syarat:
 - Kontrak ditandatangani paling lambat 30 November
 - Khusus Konstruksi minimum prestasi 50%
 - Kontrak Tahunan/Tahun Jamak pada tahun terakhir

2. Seluruh PSN

3. Tidak termasuk: alutsista TNI/pinjaman/hibah/SBN

Dalam mengambil keputusan, KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP K/L. Pemberian kesempatan paling banyak 2 kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender.

PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak, dengan ketentuan:

1. Mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
2. Pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
4. Memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
5. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;
6. Perubahan kontrak dilakukan sebelum kontrak berakhir;
7. Satker menyampaikan perubahan kontrak dengan melampirkan surat pernyataan penyedia ke KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir kontrak.

Jika setelah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender pekerjaan terselesaikan 100% diproses SPP/SPM/SP2D-pembayaran, sedangkan pekerjaan selesai sebagian/tidak selesai diajukan SPM-Penihilan.

3. Pekerjaan Tidak Selesai dan Tidak Diberikan Kesempatan ke TA Berikutnya

- Dalam hal KPA memutuskan tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, KPA/PPK melakukan penilaian atas kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- Dalam hal hasil penilaian terdapat kemajuan pekerjaan, dilakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan hak-haknya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa Kontrak.
- Pembayaran kepada Penyedia atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan dilakukan melalui pembuatan, pengujian, pengajuan, dan penerbitan SPP-pembayaran, SPM-pembayaran dan SP2D-pembayaran.
- Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, PPK membuat SPP-penihilan.

3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA

atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, PPK membuat SPP-penihilan sebesar selisih antara nilai SPM-penampungan dengan nilai SPM-pembayaran.

- SPP-penihilan dibuat dengan ketentuan menggunakan akun pengeluaran non anggaran (82xxxx) pada sisi pengeluaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan, dan dipotong dengan akun pengembalian belanja (5xxxxxx) dalam hal SPM/SP2D-penihilan akan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (4259xx), dalam hal SPM/SP2D-penihilan akan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya, pada sisi penerimaan, sehingga SPP neto bernilai nihil.
- Terhadap SPP-penihilan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-penihilan.
- PPSPM menyampaikan SPM-penihilan kepada KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa Kontrak yang paling sedikit dilampiri dengan surat pernyataan wanprestasi dan fotokopi BAPP.
- Terhadap SPM-penihilan yang memenuhi persyaratan, KPPN selaku Kuasa BUN Daerah menerbitkan SP2D-penihilan.
- Berdasarkan SP2D-penihilan, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN atau rekening lainnya milik BUN paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal SP2D-penihilan terbit.

4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Tujuan RPATA

- a. Menyempurnakan tata kelola pembayaran yang sesuai prinsip pengeluaran negara pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- b. Memenuhi prinsip periodisitas anggaran.
- c. Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu, tidak sah, terlambat diklaim dsb.
- d. Menghilangkan beban penyedia barang/jasa untuk menyediakan Bank Garansi.
- e. Mengeliminasi beban KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan Bank Garansi.
- f. Menjaring pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening Penampungan).
- g. Lebih memberikan keleluasaan waktu dalam proses penyediaan barang/jasa, sehingga diharapkan barang/jasa yang dihasilkan lebih berkualitas.
- h. Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi

keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi.

Untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

Sebagai rekening penampungan, RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan sebagaimana dimaksud merupakan pekerjaan yang:

- a. direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- b. penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

Mekanisme rekening penampungan dipandang lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan *prudent*, sesuai dengan *best practices*.

Akun yang terpengaruh akibat penerapan RPATA

Daftar akun yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme RPATA:

- a. Akun Dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga
- b. Akun Utang kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan belum disalurkan Kas pada RPATA
- c. Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi RPATA
- d. Akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- e. Akun Pengembalian Belanja TAYL
- f. Akun Belanja/Pengembalian Belanja TAB

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diatur dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

B. INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN S.D. 30 SEPTEMBER 2025

B.1. INFORMASI REALISASI BELANJA DAN ESTIMASI REALISASI

Kementerian / Lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tabel 6:
Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Jns Blnja	Pagu	Realisasi sd 30 September 2025	Sisa Pagu s.d 30 September 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C+E)	G (B-F)
51	92.814.370.000	57.507.528.262	35.306.841.738	35.306.841.738	92.814.370.000	-
52	566.060.204.000	490.000.759.392	76.059.444.608	76.059.444.608	566.060.204.000	-
53	2.937.348.000	931.036.050	2.006.311.950	2.006.311.950	2.937.348.000	-
	661.811.922.000	548.439.323.704	113.372.598.296	113.372.598.296	661.811.922.000	-

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi belanja sebesar Rp548.439.323.704,- (83%). Serapan tersebut telah di atas target penyerapan (>70%).

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp113.372.598.296,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi termasuk di dalamnya pegawai PPPK yang baru diangkat per 1 Oktober 2025 sebanyak 274 orang;
2. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN);
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka dukungan penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN);
4. Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional yaitu peningkatan kualitas putusan MK, pembangunan *E-learning*, penyusunan kebijakan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) serta pengembangan ICT dan sarana prasarana sebagai penerapan *grand design* teknologi peradilan.

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan Akhir Tahun 2025, total realisasi Adalah sebesar Rp661.811.922.000,- dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp0,-.

B.2. INFORMASI PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI SERTA RENCANA MITIGASI

Kementerian / Lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tabel 7:
Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai Serta Rencana Mitigasi

Jns Blnja	Uraian	Pagu	Realisasi sd 30 September 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa/Minus Pagu
A	B	C	D	E	F (D+E)	G (C-F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	25.014.579.000	17.268.300.682	5.191.190.896	22.459.491.578	2.555.087.422
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	15.108.787.000	11.079.775.751	3.021.757.023	14.101.532.774	1.007.254.226
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	8.922.935.000	2.519.546.444	4.580.675.305	7.100.221.749	1.822.713.251
5122	Belanja Lembur	660.000.000	-	1.223.077.000	1.223.077.000	(563.077.000)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	43.108.069.000	26.639.905.385	10.090.122.241	36.730.027.626	6.378.041.374
		92.814.370.000	57.507.528.262	24.106.822.465	81.614.350.727	11.200.019.273

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp35.306.841.738,- dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp11.200.019.273,-.

Namun demikian, pada Triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi mengajukan dispensasi Revisi Anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Barang sebesar Rp11.200.000.000,-. Anggaran tersebut untuk alokasi penambahan perkara Penanganan Perkara PUU dan SKLN, hal ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-661/ MK.03/2025 tanggal 17 Oktober 2025 hal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Revisi Anggaran Belanja Operasional ke Belanja Non Operasional.

Sehingga, diestimasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, terdapat sisa pagu Belanja Pegawai sebesar Rp19.273,-.

B.3. INFORMASI PAGU BLOKIR

Kementerian / Lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tabel 8:
Informasi Pagu Blokir

No	Kode Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	92.814.370.000	-	-	-
2	52	566.060.204.000	-	-	-
3	53	2.937.348.000	-	-	-
		661.811.922.000	-	-	-

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp187.815.665.000,-.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp187.815.665.000,- sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp0,-.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 077.01.1.653910/2025 tanggal 02 Desember 2024, terdapat anggaran Mahkamah Konstitusi yang diblokir sebesar Rp25.010.407.000,- dengan rincian Belanja Barang sebesar **Rp20.510.407.000,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp4.500.000.000,-**.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 bahwa efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dilakukan terhadap Belanja Barang (Akun 52) dan Belanja Modal (Akun 53) dengan jumlah sebesar Rp226.079.662.000 dengan rincian yaitu Belanja Barang sebesar Rp214.632.662.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp11.447.000.000,-. Namun dikarenakan tidak terdapat anggaran yang dapat diblokir, sehingga dilakukan pula blokir anggaran pada Belanja Pegawai. Sehingga sesuai dengan Revisi DIPA ke-03 tanggal 21 Februari 2025, terdapat blokir anggaran sebesar Rp226.079.662.000,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar **Rp38.263.997.000,-**, Belanja Barang sebesar **Rp174.528.153.000,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp13.287.512.000,-**.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-152/AG/AG.4/2025 tanggal 16 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2025, terdapat buka blokir sebesar Rp217.053.514.000,-, sehingga anggaran yang masih diblokir tersisa sebesar Rp9.026.148.000,- dengan rincian Belanja Barang sebesar **Rp4.526.148.000,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp4.500.000.000,-**.

Berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-194/AG/AG.4/2025 tanggal 27 Maret 2025 hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Konstitusi, bahwa usulan revisi anggaran buka blokir sebesar **Rp9.026.148.000,-** dan pergeseran antar Program sebesar Rp16.791.254.000,- telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

Sehingga sampai dengan 30 September 2025, tidak terdapat blokir pagu pada Mahkamah Konstitusi.

C. INFORMASI *OUTSTANDING* KONTRAK**C.1. INFORMASI *OUTSTANDING* KONTRAK**

Kementerian / Lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tabel 9:
Informasi *Outstanding* Kontrak

No	Eselon I	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
1	Mahkamah Konstitusi	17	19.140.405.463	9.288.237.887	9.852.167.576

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat 17 (tujuh belas) kontrak yang masih *outstanding* dengan nilai kontrak sebesar Rp19.140.405.463,- dan realisasi sebesar Rp9.288.237.887,-.

Berdasarkan *outstanding* kontrak tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) kontrak merupakan *outstanding* kontrak signifikan dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian / Lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (653910)

Tabel 10:
Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

No	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1	A/018.25 000242/0 /0	Pengadaan Sewa Kendaraan Pejabat Negara Hakim Konstitusi dan Pejabat Struktural Tahun Anggaran 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	7.959.060.000	3.979.530.000	3.979.530.000
2	A/018.25 000119/0 /0	Pengadaan Sewa Internet MKRI, PUSDIK, VPN dan CSS di Mahkamah Konstitusi Tahun 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	2.640.000.000	1.760.000.000	880.000.000
3	A/018.25 003081/0 /0	Pekerjaan Pemeliharaan ICT Tahun Anggaran 2025	13 Juni 2025	31 Desember 2025	2.286.600.000	-	2.286.600.000
4	A/018.25 000120/0 /1	Pengadaan Sewa Internet untuk <i>Mini Courtroom</i> di 52 Lokasi TA 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	2.066.875.988	1.458.725.326	608.150.662
5	A/018.25 000946/0 /1	Pengadaan Jasa <i>Outsourcing</i> Tenaga Pengemudi, Tenaga Pengamanan, Tenaga Kebersihan dan Pramubakti TA 2025	1 Februari 2025	31 Desember 2025	1.312.729.814	836.153.552	476.576.262
6	A/018.25 003204/0 /0	Pengadaan <i>Artificial Intelligence (AI) Platform</i>	23 Juni 2025	31 Desember 2025	893.000.001	446.500.000	446.500.001

No	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
7	A/018.25 000469/0 /0	Pekerjaan Penyediaan Fasilitas <i>Scenting</i> di Gedung MK TA 2025	10 Januari 2025	31 Desember 2025	310.255.000	151.255.000	159.000.000
8	A/018.25 000170/0 /0	Pengadaan Sewa Dispenser Air Galon di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	306.000.000	210.000.000	96.000.000
9	A/018.25 005551/0 /0	Pengadaan Pakaian Dinas PPPK Periode II TA 2025	29 September 2025	3 Desember 2025	210.432.033	-	210.432.033
10	A/018.25 000220/0 /2	Pengadaan Air Minum Isi Ulang di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	192.000.000	92.800.000	99.200.000
11	A/018.25 000624/0 /0	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Mahkamah Konstitusi berupa Penyediaan Fasilitas Sanitasi Bulan Januari-Desember TA. 2025	15 Januari 2025	31 Desember 2025	188.369.993	90.655.877	97.714.116
12	A/018.25 000178/0 /1	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Lift Gedung Pusat MK dan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2025	180.544.419	96.620.517	83.923.902
13	A/018.25 003272/0 /0	Pengadaan Jasa Penyedia Aplikasi Media Monitoring Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2025	1 Juli 2025	31 Desember 2025	138.000.000	46.000.000	92.000.000
14	A/018.25 000470/0 /0	Pekerjaan Pengendalian Serangga dan Hama di Gedung Mahkamah Konstitusi TA. 2025	10 Januari 2025	31 Desember 2025	132.316.800	64.516.800	67.800.000
15	A/018.25 004124/0 /1	Pemeliharaan Trafo Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025	4 Agustus 2025	31 Desember 2025	118.725.600	-	118.725.600

No	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
16	A/018.25 000625/0 /0	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Mahkamah Konstitusi berupa Penyediaan Fasilitas <i>Hygiene</i> berupa Pengharum Ruangan Bulan Januari-Desember TA. 2025	15 Januari 2025	31 Desember 2025	115.474.815	55.480.815	59.994.000
17	A/018.25 004170/0 /0	Pengadaan Aplikasi e-SOP	31 Juli 2025	31 Desember 2025	90.021.000	-	90.021.000
					19.140.405.463	9.288.237.887	9.852.167.576

Berdasarkan *outstanding* k ontrak signifikan tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak 0 (nol) kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada kontrak Pengadaan *Artificial Intelligence (AI) Platform*, sesuai dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen VII Nomor 12000/2700/TI.00/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Addendum Kontrak Pengadaan *Artificial Intelligence (AI) Platform* bahwa akan dilakukan addendum kontrak di bulan Oktober 2025 dikarenakan terdapat belanja sewa pada lampiran kontrak dimaksud senilai Rp291.375.000,-. Dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan sewa dimaksud dalam kontrak tidak memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara optimal, maka akan dilakukan penyesuaian nilai Pekerjaan Pengadaan *Artificial Intelligence (AI) Platform* dengan melaksanakan addendum kontrak perkerjaan tersebut yang semula Rp893.000.001,- berkurang menjadi Rp601.625.001,-.

INFORMASI PENTING LAINNYA

D. INFORMASI PENTING LAINNYA

D.1. KONDISI

1. Penggunaan Sementara Gedung III Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Sebagian Bangunan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 118.1/PK/2023 bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengguna sementara sebagian bangunan (lantai *basement*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12^a) seluas 4.351,25 m² beserta peralatan dan mesin yang melekat pada gedung yang berada di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat guna menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Sebagian Bangunan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PK/2023 bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengguna sementara sebagian bangunan (lantai 8, 9, 10, 11, dan 12) seluas 4.321,25 m² yang berada di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat guna menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari tanggal 27 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juni 2026, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

D.2. HAL KHUSUS MENYANGKUT PROGRAM STRATEGIS/ PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM UTAMA

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi, Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui 4 (empat) program prioritas, 4 (empat) kegiatan prioritas dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Sampai dengan Triwulan III TA 2025, kontrak telah ditandatangani pihak ketiga/tenaga ahli untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan FGD secara *hybrid* direncanakan untuk menghimpun masukan dari akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan nasional guna memperkuat substansi rancangan kebijakan.
- 2) Konferensi *Internasional Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS) untuk memberikan dukungan substantif dan masukan berharga dari negara lain yang akan menjadi landasan dalam proses penyusunan naskah kebijakan mengenai pengaduan konstitusional di Indonesia.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan naskah kajian kebijakan kewenangan pengaduan konstitusional dengan anggaran yang telah disesuaikan menjadi Rp250.000.000,-.

Solusi atau rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah bahwa meskipun terjadi optimalisasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp250.000.000,-, target output berupa 1 (satu) dokumen rekomendasi kebijakan diyakini tetap dapat direalisasikan secara optimal. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak dengan tenaga ahli sebagai kegiatan utama dengan alokasi anggaran terbesar telah berjalan sesuai perencanaan dan mendukung capaian target output.
2. Sisa pagu anggaran masih memadai untuk mendanai kegiatan krusial berikutnya, antara lain pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD).
3. Proses finalisasi dokumen rekomendasi kebijakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga target output diyakini tercapai pada Tahun Anggaran 2025.

b. Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan

Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan sudah mulai dilaksanakan pada tahap:

1. Pengadaan AI Platform
Proses pengadaan AI platform sebagai infrastruktur dasar sudah dilaksanakan sampai dengan Termin I sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan teknis yang telah ditetapkan.
2. Pengembangan Sistem AI
Pengembangan platform berbasis AI terus berlanjut dan pada Triwulan III ini telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam tahap pengembangan awal (*early development*).

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, capaian output program nasional hingga akhir Triwulan III telah mencapai sekitar 75% dari total target tahunan. Capaian ini menunjukkan

bahwa program berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan mencapai 100% pada akhir tahun anggaran.

Secara implementasi, belum ada unit yang dapat dihitung (0 unit). Akan tetapi, progres pengembangan sistem sudah mencapai $\pm 90\%$. Tahapan yang telah dicapai meliputi:

- Penyempurnaan fitur inti (*Legal Search, Legal Consultation, Legal Recommendation, Decision Prediction, Risk Impact Analysis, Digital Court Library, Jurisprudence Tracking, Legal Drafting*).
- Integrasi dasar ICT: VPN, GPU, *Active Directory*, serta persiapan *crawling* regulasi dan *endpoint* MK.
- Uji coba internal pada beberapa fitur (*pagination*, filter dokumen, komparasi literasi, *numbering* referensi, validasi output).

Capaian ini menunjukkan program berjalan sesuai jadwal, namun secara formal output belum dapat diklaim sebagai 1 unit sampai tahap implementasi penuh dan validasi akhir (direncanakan selesai di Triwulan IV TA 2025).

Pada Triwulan III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan sistem *Artificial Intelligence* (AI), antara lain:

1. Output sistem AI masih belum sepenuhnya valid, sehingga diperlukan proses verifikasi dan *cross-check* data untuk memastikan hasil yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Terjadi kendala teknis dalam proses integrasi antara AI Platform dan sistem eksisting, yang berdampak pada keterlambatan sinkronisasi data.
3. Implementasi penuh sistem AI belum terlaksana, sehingga meskipun progres pengembangan telah mencapai sekitar 90%, realisasi output masih 0 (nol) unit.
4. Ditemukan kendala teknis dalam penyempurnaan fitur AI, yang mengakibatkan penundaan pada tahap integrasi perangkat.
5. Spesifikasi teknis yang kompleks memerlukan koordinasi lintas tim secara intensif, yang berdampak pada lamanya waktu penyelesaian.
6. Proses validasi data dan integrasi sistem masih berlangsung, sehingga output awal belum sepenuhnya valid dan masih memerlukan serangkaian uji, seperti *User Acceptance Test* (UAT) dan Uji Penetrasi (*penetration test*).

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi, telah dilakukan sejumlah langkah perbaikan dan solusi sebagai berikut:

1. Melibatkan tim Asisten Asli (ASLI) dan Panitera Konstitusi (PASTI) dalam kegiatan uji validasi hasil keluaran *AI Platform*.
2. Membentuk tim gabungan antara pengembang AI dan pengelola sistem internal guna mempercepat proses integrasi sistem.
3. Melanjutkan koordinasi dengan vendor dalam rangka finalisasi fitur AI
4. Menetapkan jadwal rapat teknis rutin untuk menuntaskan penyusunan spesifikasi teknis serta integrasi sistem

5. Menetapkan target implementasi penuh pada Triwulan IV Tahun 2025 sehingga hasilnya dapat tercatat sebagai realisasi unit

c. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada Triwulan III Tahun 2025, telah disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 47 laporan. Dari hasil Monev Triwulan I hingga Triwulan III, telah ditetapkan lima putusan yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

Sebagai bagian dari persiapan kegiatan FGD, telah dilakukan beberapa langkah, antara lain:

- Diskusi penajaman terhadap putusan yang telah ditetapkan sebagai bahan FGD;
- Identifikasi adresat yang akan menjadi narasumber dari lima putusan terpilih;
- Penyusunan dokumen pendukung, meliputi *Terms of Reference* (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), susunan acara, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan FGD Monev Putusan Mahkamah Konstitusi direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2025.

Kompilasi Putusan Tematik yang telah disusun sebanyak 14 tematik, dan saat ini tengah dipersiapkan sebagai bahan untuk kegiatan sinkronisasi putusan tematik. Saat ini dalam proses persiapan meliputi penyusunan TOR, RAB, susunan acara, serta kelengkapan administrasi keuangan. Kegiatan sinkronisasi tersebut direncanakan akan direalisasikan pada bulan November 2025.

Anotasi Putusan telah disiapkan sebagai bahan untuk kegiatan sinkronisasi putusan tematik. Saat ini kegiatan masih berada pada tahap persiapan, yang meliputi penyusunan TOR, RAB, susunan acara, serta kelengkapan administrasi keuangan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan terealisasi pada bulan Desember 2025.

Permasalahan yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada bulan Oktober 2025, namun masih menunggu selesainya dukungan penanganan perkara PHPU yang berlangsung hingga tanggal 9 Oktober 2025.

Dalam kondisi pasca optimalisasi anggaran, kegiatan pada Program/Output “Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi” tetap akan dilaksanakan di Kantor Mahkamah Konstitusi, dengan bentuk kegiatan berupa FGD maupun konsinyering. Kegiatan tersebut akan melibatkan narasumber dan peserta eksternal maupun internal Mahkamah Konstitusi, yang dibagi ke dalam beberapa kelas/kelompok pelaksanaan, dengan memanfaatkan fasilitas ruangan yang tersedia. Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengurangi capaian output, yang tetap sesuai dengan target awal yaitu tiga laporan.

Adapun perubahan alokasi anggaran setelah optimalisasi adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK, dari Rp300.000.000,- menjadi Rp50.000.000,-;

- Kegiatan Penyusunan Kompilasi Putusan MK Tematik, dari Rp300.000.000,- menjadi Rp50.000.000,-; dan
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, dari Rp1.400.000.000,- menjadi Rp200.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi, telah disusun beberapa langkah dan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan FGD Monev Putusan akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan memanfaatkan aula dan ruang rapat yang tersedia. Pelaksanaan dilakukan secara *hybrid*, menggabungkan metode *luring* dan *daring*, dan dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober 2025.
2. Kegiatan Kompilasi Putusan Tematik akan dilaksanakan dalam bentuk uji sahih terhadap hasil penyusunan kompilasi putusan tematik, juga dengan metode *hybrid*. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh unit kerja di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, serta mengundang enam narasumber, masing-masing tiga orang dari Kementerian Hukum dan HAM serta tiga orang dari Bappenas. Kegiatan ini direncanakan pada bulan November 2025.
3. Kegiatan Anotasi Putusan akan dilaksanakan dalam bentuk uji sahih atas hasil penyusunan anotasi putusan yang telah disusun. Kegiatan ini akan melibatkan unit kerja di Lingkungan Mahkamah Konstitusi dan mengundang narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM serta Bappenas, masing-masing sebanyak tiga orang. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada akhir Desember 2025.

d. Pembangunan *E-Learning*

Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan *E-Learning* yang saat ini telah memasuki tahap pengembangan. Beberapa capaian utama yang telah direalisasikan pada periode ini antara lain:

1. Pengembangan aplikasi Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) sebagai *platform* pembelajaran digital Mahkamah Konstitusi;
2. Pembangunan studio dan persiapan pengembangan konten pembelajaran untuk mendukung kegiatan pendidikan berbasis daring; serta
3. Proses pengadaan perangkat pendukung multimedia bagi studio *e-learning*.

Dengan berbagai capaian tersebut, progres pembangunan Sistem Informasi *E-Learning* mencapai sekitar 75%. Konsep aplikasi *E-Learning* MKLC dapat diakses melalui tautan: <https://mklc.mkri.id>.

Selanjutnya, setelah tahap pengembangan aplikasi selesai, akan dilakukan uji coba materi dan media pembelajaran kepada para ahli sebagai tahap validasi awal. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan uji coba kepada peserta pembelajaran sebelum sistem secara resmi dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan *E-Learning* pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Proses pengembangan aplikasi masih dilakukan dari tahap awal dan dilaksanakan secara swadaya dengan bekerja sama bersama tim IT Mahkamah Konstitusi. Pekerjaan pengembangan dilakukan oleh satu orang programmer, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama untuk membangun sistem informasi secara menyeluruh.
2. Pembuatan modul pembelajaran serta pengadaan perangkat multimedia untuk mendukung studio *e-learning* mengalami kendala pada tahap pengadaan, yang berdampak pada mundurnya target penyelesaian pembangunan *e-learning* pada Triwulan III.
3. Permasalahan teknis terkait penerapan teknologi baru dalam pengembangan *E-Learning*, di mana sistem yang dibangun belum dapat langsung dilakukan *deployment* ke *server*, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk penyesuaian dan pengujian.

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan *E-Learning*, telah disusun beberapa solusi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang belum terlaksana serta mempercepat proses pembangunan *E-Learning* agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Menambah tenaga prajabatan komputer/programmer guna memperkuat kapasitas tim dan mempercepat penyelesaian pengembangan sistem.
3. Mempercepat proses penyusunan dan finalisasi modul pembelajaran agar dapat segera diunggah sebagai materi dalam platform *E-Learning*.
4. Melakukan perbaikan teknis terhadap kendala proses *deployment* ke server MKRI, termasuk identifikasi penyebab error dan pengujian ulang sistem.
5. Mempercepat proses pengadaan perangkat multimedia pendukung untuk melengkapi fasilitas studio *E-Learning*, sehingga kegiatan produksi konten dapat segera berjalan optimal.

D.3. KONDISI KEUANGAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS K/L

Pada Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat kondisi keuangan yang memerlukan perhatian khusus.

DATA CAPAIAN RO PER FUNGSI DAN PRIORITAS NASIONAL**E. DATA CAPAIAN RO PER FUNGSI DAN PRIORITAS NASIONAL****E.1 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN**

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Konstitusi RI
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
077.01.BJ	PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI								
3372	Penanganan Perkara Konstitusi								
BCE	Penanganan Perkara								
3372.QCE.003	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	456.320.548.000	434.430.733.098	95.2%	504	508	Perkara	100%	
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
3372.UAE.001	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	2.000.000.000	-	0%	3	2	Laporan	75.02%	
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara								
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
4246.BDC.001	Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara	367.360.000	37.800.000	10.29%	750	376	Orang	50.13%	
4246.BDC.002	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	367.360.000	15.300.000	4.16%	750	437	Orang	58.26%	
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan								
4246.UAB.001	Pembangunan e-learning	1.000.000.000	316.070.058	31.61%	1	0	Sistem Informasi	74.99%	
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK								
AEC	Kerja sama								
4247.AEC.964	Kerjasama Internasional	7.636.131.000	591.965.981	7.75%	12	2	Kegiatan	66.66%	
BMA	Data dan Informasi Publik								
4247.BMA.001	Informasi Perkara dan Putusan MK melalui Media Elektronik	61.800.000	1.800.000	2.91%	1	0	Layanan	75%	
4247.BMA.002	Informasi Perkara dan Putusan MK melalui Tatap Muka	4.827.652.000	1.004.288.068	20.8%	1	0	Layanan	75%	
7068	Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi								
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
7068.ABD.001	Kebijakan Strategis	385.519.000	41.540.557	10.78%	3	1	Kajian	74.98%	
7068.ABD.002	Dukungan Literasi Konstitusi	310.207.000	212.721.600	68.57%	1.00 00	0	Rekomendasi Kebijakan	79.12%	
PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
7068.PBD.001	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)	1.000.000.000	10.538.296	1.05%	1	0	Rekomendasi Kebijakan	74.98%	
7069	Perkara								
CAQ	Sarana Bidang Hukum								
7069.CAQ.001	Sistem Teknologi dan Informasi	8.452.652.000	4.256.052.356	50.35%	6	2	Unit	74.98%	
RAQ	Sarana Bidang Hukum								

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
7069.RAQ.001	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan	1.000.000.000	15.408.000	1.54%	1	0	Unit	74.98%	
077.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
3367.EBA.994	Layanan Perkantoran	92.814.370.000	54.340.436.160	58.55%	1	0	Layanan	74.98%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
3367.EBD.001	Rencana Kinerja MK	20.469.000	20.468.400	100%	2	2	Dokumen	100%	
3367.EBD.002	Layanan Penyusunan LAKIN	5.000.000	2.758.350	55.17%	12	12	Dokumen	100%	
3367.EBD.003	Evaluasi Kinerja dan Anggaran	195.000.000	74.600.350	38.26%	12	9	Dokumen	74.98%	
3367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	196.488.000	41.007.150	20.87%	18	14	Dokumen	77.77%	
3367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	106.847.000	57.944.940	54.23%	4	3	Dokumen	75%	
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
3369.EBA.001	Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran	25.288.000	7.930.800	31.36%	1	0	Layanan	74.98%	
3369.EBA.956	Layanan BMN	21.600.000	10.947.800	50.68%	1	0	Layanan	74.98%	
3369.EBA.962	Layanan Umum	15.600.000	1.348.000	8.64%	1	0	Layanan	74.98%	
3369.EBA.994	Layanan Perkantoran	81.093.577.000	47.026.148.004	57.99%	1	0	Layanan	74.98%	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
3369.EBB.951	Sarana Internal	674.064.000	377.326.458	55.98%	15	9	Unit	59.98%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
3369.EBB.971	Prasarana Internal	422.400.000	85.370.300	20.21%	4	3	Unit	75%	
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern								
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
4245.EBD.001	Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	82.910.000	4.812.600	5.8%	2	1	Dokumen	50%	
4245.EBD.965	Layanan Audit Internal	26.758.000	25.815.680	96.48%	3	2	Laporan	66.66%	
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
5238.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	97.200.000	77.189.600	79.41%	1	0	Layanan	74.98%	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								
5238.EBC.001	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1.000	-	0%	1	1	Orang	100%	
5238.EBC.002	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	17.000.000	17.000.000	100 %	3	0	Orang	96.8%	
5238.EBC.003	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	110.636.000	107.918.489	97.54%	4	0	Orang	93.99%	
5238.EBC.004	Peningkatan Kapasitas SDM	1.870.075.000	1.616.886.457	86.46%	51	51	Orang	100%	
5238.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	169.027.000	130.036.690	76.93%	1	0	Layanan	74.98%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
5238.EBD.001	Layanan Reformasi Birokrasi	118.383.000	76.529.500	64.65%	1	0	Layanan	74.98%	

E.2. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN (PRIORITAS NASIONAL)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi, Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 4 (empat) program prioritas, 4 (empat) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp5.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp480.331.228,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11:
Capaian Output Program Prioritas Nasional Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Konstitusi RI
Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI
Satker : Mahkamah Konstitusi RI

No	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)	1.000.000.000	10.538.296	1,05	Rekomendasi Kebijakan	1	0	74,98%
2	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan <i>Grand Design</i> Teknologi Peradilan	1.000.000.000	15.408.000	1,54	Unit	1	0	74,98%
3	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	2.000.000.000	0	0,00	Laporan	3	2	75,02%
4	Pembangunan <i>e-learning</i>	1.000.000.000	454.384.932	45,44	Sistem Informasi	1	0	74,99%
JUMLAH		5.000.000.000	480.331.228	9,61				

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SESUAI PMK
NOMOR 232/PMK.05/2022



**SURAT HASIL REKONSILIASI
(SHR)
BULAN SEPTEMBER 2025**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 653910 - MAHKAMAH KONSTITUSI RI
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-09

Tgl Cetak : 20/10/25 7:09

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	661,811,922,000	661,811,922,000	0
2	Belanja	548,439,323,704	548,439,323,704	0
3	Pengembalian Belanja	-135,662,542	-135,662,542	0
4	Estimasi Pendapatan	3,111,028,000	3,111,028,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,744,775,929	1,744,775,929	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	12,656,825,486	12,656,825,486	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	12,656,825,486	12,656,825,486	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19 Oktober 2025



**LAPORAN DARI
APLIKASI SAKTI
(HASIL REKONSILIASI)**



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 12:29 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	548,303,661,162
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,744,775,929	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	128,977,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,080,037,066
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	18,000,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	165,629,254
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,830,004
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	155,747,006
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	178,128,099
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	15,427,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,152,535,240	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	163,852	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	832,520,170	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	249,122,126	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	795,350,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	993,130,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	178,543,694	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,258,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,330,232,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	133,445,000	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429,660,000	0
3.0	511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	5,104	0
3.0	511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	42,966,000	0
3.0	511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	4,804,800	0
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	7,854,418,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,729,599,587	0
3.0	511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	18,322,260	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,739,874,137	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39,572	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	101,287,270	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	31,890,258	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	166,869,083	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	107,833,380	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	344,974,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	26,778,744	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	24,333,185,965	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,306,719,420	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 12:29 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:47 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,748,302,632	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34,202,792	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	342,162,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,656,791,430	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,265,153,754	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	432,668,479,045	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,651,324,443	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,752,688	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,687,971,297	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	7,205,900,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	139,422,341	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	629,410,695	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	49,600,350	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,014,714,728	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	553,502,703	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,364,230,590	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228,554,987	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	525,981,686	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	124,482,333	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,122,286,202	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,462,790,058	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,640,000	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	490,101,738	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685,817,864	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	12,255,332	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	166,535,174	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	20,477,680	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	45,950,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,959,500
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	751
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,040,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	34,439,305
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,376,154
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	50,021,688
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	27,909,687
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	14,915,457
JUMLAH			550,184,099,633	550,184,099,633

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO
196705131988021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 077
ESELON I : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 01
SATUAN KERJA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 653910

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM
Tgl Cetak : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,111,028,000	1,744,775,929	(1,366,252,071)	56.08	1,728,407,000	1,806,137,558	77,730,558	104.5
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,111,028,000	1,744,775,929	(1,366,252,071)	56.08	1,728,407,000	1,806,137,558	77,730,558	104.5
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,111,028,000	1,744,775,929	(1,366,252,071)	56.08	1,728,407,000	1,806,137,558	77,730,558	104.5
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	661,811,922,000	548,303,661,162	(113,508,260,838)	82.85	607,819,406,000	481,711,974,719	(126,107,431,281)	79.25
1. Belanja Pegawai	92,814,370,000	57,469,088,706	(35,345,281,294)	61.92	69,204,615,000	51,426,284,405	(17,778,330,595)	74.31
2. Belanja Barang	566,060,204,000	489,903,536,406	(76,156,667,594)	86.55	511,094,661,000	421,749,337,624	(89,345,323,376)	82.52
3. Belanja Modal	2,937,348,000	931,036,050	(2,006,311,950)	31.70	27,520,130,000	8,536,352,690	(18,983,777,310)	31.02
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 077
ESELON I : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 01
SATUAN KERJA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI 653910

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM
Tgl Cetak : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	661,811,922,000	548,303,661,162	(113,508,260,838)	82.85	607,819,406,000	481,711,974,719	(126,107,431,281)	79.25
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO
NIP 196705131988021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
ESELON I : 01 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 653910 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	115,000,000	128,977,000	0	128,977,000	112.15
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,996,028,000	1,080,037,066	0	1,080,037,066	36.05
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	18,000,000	0	18,000,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	165,629,254	0	165,629,254	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	3,111,028,000	1,392,643,320	0	1,392,643,320	44.76
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,830,004	0	2,830,004	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	2,830,004	0	2,830,004	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	155,747,006	0	155,747,006	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	178,128,099	0	178,128,099	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	15,427,500	0	15,427,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	349,302,605	0	349,302,605	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,111,028,000	1,744,775,929	0	1,744,775,929	56.08
	JUMLAH PENDAPATAN	3,111,028,000	1,744,775,929	0	1,744,775,929	56.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 653910
JENIS SATUAN KERJA : KP

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DKI JAKARTA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/10/25 2:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	23,058,000,000	17,069,907,000	12,152,535,240	1,959,500	12,150,575,740	71.18	4,919,331,260
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	454,000	257,000	163,852	751	163,101	63.46	93,899
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,120,000,000	1,167,244,000	832,520,170	0	832,520,170	71.32	334,723,830
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	350,000,000	349,136,000	249,122,126	0	249,122,126	71.35	100,013,874
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	938,000,000	1,270,206,000	795,350,000	0	795,350,000	62.62	474,856,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	952,000,000	1,549,942,000	993,130,000	0	993,130,000	64.08	556,812,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	70,000,000	197,759,000	178,543,694	0	178,543,694	90.28	19,215,306
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	770,000,000	902,799,000	603,258,600	0	603,258,600	66.82	299,540,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,060,000,000	2,324,297,000	1,330,232,000	0	1,330,232,000	57.23	994,065,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	210,000,000	183,032,000	133,445,000	2,040,000	131,405,000	71.79	51,627,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	30,528,454,000	25,014,579,000	17,268,300,682	4,000,251	17,264,300,431	69.02	7,750,278,569
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	546,840,000	585,900,000	429,660,000	0	429,660,000	73.33	156,240,000
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	350,000	9,000	5,104	0	5,104	56.71	3,896
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	54,684,000	58,590,000	42,966,000	0	42,966,000	73.33	15,624,000
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	6,104,000	6,552,000	4,804,800	0	4,804,800	73.33	1,747,200
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	9,996,532,000	10,710,570,000	7,854,418,000	0	7,854,418,000	73.33	2,856,152,000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,492,000,000	3,722,180,000	2,729,599,587	0	2,729,599,587	73.33	992,580,413
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	23,380,000	24,986,000	18,322,260	0	18,322,260	73.33	6,663,740
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	13,119,890,000	15,108,787,000	11,079,775,751	0	11,079,775,751	73.33	4,029,011,249
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	17,780,000,000	5,789,873,000	1,739,874,137	0	1,739,874,137	30.05	4,049,998,863
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	350,000	134,000	39,572	0	39,572	29.53	94,428
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	406,000,000	331,253,000	101,287,270	0	101,287,270	30.58	229,965,730
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	252,000,000	86,209,000	31,890,258	0	31,890,258	36.99	54,318,742
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,590,000,000	907,695,000	166,869,083	0	166,869,083	18.38	740,825,917
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	840,000,000	307,242,000	107,833,380	0	107,833,380	35.1	199,408,620
511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,540,000,000	1,280,089,000	344,974,000	0	344,974,000	26.95	935,115,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	220,440,000	26,778,744	0	26,778,744	12.15	193,661,256
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	25,408,350,000	8,922,935,000	2,519,546,444	0	2,519,546,444	28.24	6,403,388,556
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	718,800,000	335,000,000	0	0	0	0	335,000,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	700,000,000	325,000,000	0	0	0	0	325,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
ESELON I : 01 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 653910 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/10/25 2:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,418,800,000	660,000,000	0	0	0	0	660,000,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,800,000,000	34,848,538,000	24,333,185,965	34,439,305	24,298,746,660	69.73	10,549,791,340
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,200,000,000	8,259,531,000	2,306,719,420	0	2,306,719,420	27.93	5,952,811,580
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	39,000,000,000	43,108,069,000	26,639,905,385	34,439,305	26,605,466,080	61.72	16,502,602,920
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	109,475,494,000	92,814,370,000	57,507,528,262	38,439,556	57,469,088,706	61.92	35,345,281,294
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,444,000,000	36,545,652,000	21,748,302,632	4,376,154	21,743,926,478	59.5	14,801,725,522
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	250,000,000	70,000,000	34,202,792	0	34,202,792	48.86	35,797,208
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	835,453,000	823,786,000	342,162,000	0	342,162,000	41.54	481,624,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,733,896,000	9,361,378,000	6,656,791,430	0	6,656,791,430	71.11	2,704,586,570
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	16,263,349,000	46,800,816,000	28,781,458,854	4,376,154	28,777,082,700	61.49	18,023,733,300
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	19,229,276,000	3,014,629,000	1,265,153,754	0	1,265,153,754	41.97	1,749,475,246
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	347,784,958,000	453,822,257,000	432,668,479,045	50,021,688	432,618,457,357	95.33	21,203,799,643
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,264,736,000	3,399,525,000	2,651,324,443	0	2,651,324,443	77.99	748,200,557
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	33,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	109,892,000	16,850,000	8,752,688	0	8,752,688	51.94	8,097,312
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	378,421,862,000	460,263,261,000	436,593,709,930	50,021,688	436,543,688,242	94.85	23,719,572,758
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,266,201,000	2,505,225,000	1,687,971,297	0	1,687,971,297	67.38	817,253,703
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6,266,201,000	2,505,225,000	1,687,971,297	0	1,687,971,297	67.38	817,253,703
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	10,049,900,000	9,738,359,000	7,205,900,900	27,909,687	7,177,991,213	73.71	2,560,367,787
522112	Belanja Langganan Telepon	468,000,000	198,000,000	139,422,341	0	139,422,341	70.42	58,577,659
522113	Belanja Langganan Air	360,000,000	985,000,000	629,410,695	0	629,410,695	63.9	355,589,305
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	180,000,000	49,600,350	0	49,600,350	27.56	130,399,650
522141	Belanja Sewa	21,970,869,000	15,149,014,000	9,014,714,728	0	9,014,714,728	59.51	6,134,299,272
522151	Belanja Jasa Profesi	4,362,596,000	4,652,896,000	553,502,703	0	553,502,703	11.9	4,099,393,297
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,634,626,000	2,365,380,000	1,364,230,590	0	1,364,230,590	57.67	1,001,149,410
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	40,857,991,000	33,280,649,000	18,956,782,307	27,909,687	18,928,872,620	56.88	14,351,776,380
5231	Belanja Pemeliharaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
ESELON I : 01 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 653910 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/10/25 2:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	631,469,000	2,498,941,000	228,554,987	0	228,554,987	9.15	2,270,386,013
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	525,982,000	525,982,000	525,981,686	0	525,981,686	100	314
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,215,224,000	553,960,000	124,482,333	0	124,482,333	22.47	429,477,667
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,231,000,000	5,090,203,000	1,122,286,202	0	1,122,286,202	22.05	3,967,916,798
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	97,500,000	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	14,701,175,000	8,774,086,000	2,001,305,208	0	2,001,305,208	22.81	6,772,780,792
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,272,484,000	6,504,829,000	1,462,790,058	14,915,457	1,447,874,601	22.26	5,056,954,399
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,897,548,000	366,726,000	26,640,000	0	26,640,000	7.26	340,086,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	118,631,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,489,674,000	81,920,000	0	0	0	0	81,920,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	26,778,337,000	6,953,475,000	1,489,430,058	14,915,457	1,474,514,601	21.21	5,478,960,399
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,695,168,000	7,482,692,000	490,101,738	0	490,101,738	6.55	6,992,590,262
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	495,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	5,190,168,000	7,482,692,000	490,101,738	0	490,101,738	6.55	6,992,590,262
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	49,725,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	49,725,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	488,528,808,000	566,060,204,000	490,000,759,392	97,222,986	489,903,536,406	86.55	76,156,667,594
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,613,000,000	1,145,144,000	685,817,864	0	685,817,864	59.89	459,326,136
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	260,000,000	0	0	0	0	0	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	4,705,000,000	21,200,000	12,255,332	0	12,255,332	57.81	8,944,668
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	9,578,000,000	1,166,344,000	698,073,196	0	698,073,196	59.85	468,270,804
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49,776,000	0	0	0	0	0	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	95,000,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	170,000,000	166,535,174	0	166,535,174	97.96	3,464,826
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	144,776,000	245,000,000	166,535,174	0	166,535,174	67.97	78,464,826
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	200,000,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
ESELON I : 01 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 653910 **MAHKAMAH KONSTITUSI RI**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/10/25 2:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan	300,000,000	0	0	0	0		0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	2,000,000,000	195,000,000	0	0	0	0	195,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	2,500,000,000	195,000,000	0	0	0	0	195,000,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,250,000,000	1,170,704,000	20,477,680	0	20,477,680	1.75	1,150,226,320
536117	Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	49,100,000	0	0	0	0	49,100,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	111,200,000	45,950,000	0	45,950,000	41.32	65,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,250,000,000	1,331,004,000	66,427,680	0	66,427,680	4.99	1,264,576,320
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	13,472,776,000	2,937,348,000	931,036,050	0	931,036,050	31.7	2,006,311,950
	JUMLAH BELANJA	611,477,078,000	661,811,922,000	548,439,323,704	135,662,542	548,303,661,162	82.85	113,508,260,838

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077
SATUAN KERJA : 653910

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 21/10/25 7:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi							
3372	Penanganan Perkara Konstitusi	366,133,125,000	458,320,548,000	434,480,754,786	50,021,688	434,430,733,098	94.8	23,889,814,902
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	9,000,000,000	1,734,720,000	507,484,932	0	507,484,932	29.25	1,227,235,068
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	18,905,006,000	12,525,583,000	1,611,563,870	13,509,821	1,598,054,049	12.87	10,927,528,951
7068	Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	5,965,000,000	1,695,726,000	264,800,453	0	264,800,453	15.62	1,430,925,547
7069	Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	16,600,000,000	9,452,652,000	4,271,460,356	0	4,271,460,356	45.19	5,181,191,644
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BJ	416,603,131,000	483,729,229,000	441,136,064,397	63,531,509	441,072,532,888	91.19	42,656,696,112
WA	Program Dukungan Manajemen							
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	112,725,494,000	93,338,174,000	57,704,307,452	38,439,556	57,665,867,896	61.82	35,672,306,104
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	77,248,453,000	82,252,529,000	47,542,762,839	33,691,477	47,509,071,362	57.8	34,743,457,638
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	550,000,000	109,668,000	30,628,280	0	30,628,280	27.93	79,039,720
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	4,350,000,000	2,382,322,000	2,025,560,736	0	2,025,560,736	85.02	356,761,264
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	194,873,947,000	178,082,693,000	107,303,259,307	72,131,033	107,231,128,274	60.25	70,851,564,726
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	611,477,078,000	661,811,922,000	548,439,323,704	135,662,542	548,303,661,162	82.87	113,508,260,838
	JUMLAH	611,477,078,000	661,811,922,000	548,439,323,704	135,662,542	548,303,661,162	82.87	113,508,260,838

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI : 01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl. Cetak 21/10/2025 7:47 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	856,618,430	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	39,179,179	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	84,402,845	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	23,763,818
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,147,029,488	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,836,898	0
0.0	117114	Suku Cadang	42,445,310	0
0.0	117131	Bahan Baku	8,047,102	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	435,274,311	0
0.0	131111	Tanah	506,815,456,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	325,983,313,013	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	287,721,846,960	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	3,086,204,000	0
0.0	134113	Jaringan	42,408,032,272	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	14,527,818,271	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,133,559,498	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3,483,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	258,250,454,753
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	46,879,844,226
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,355,682,835
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,108,007,982
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	68,249,500
0.0	138311	Properti Investasi	11,958,905,308	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	1,938,393,500
0.0	162151	Software	22,049,525,345	0
0.0	162161	Lisensi	1,723,042,756	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,584,805,550	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	10,344,831,450	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	16,406,312,177	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 653910

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

DKI JAKARTA

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl. Cetak 21/10/2025 7:47 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	16,406,312,177
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	20,606,160,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	969,576,670
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	695,657,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	7,987,121
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,090,548,016
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	10,119,389,058
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,076,404,584
0.0	391111	Ekuitas	0	886,769,537,641
JUMLAH			1,273,365,969,163	1,273,365,969,163

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,860,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	10,796,825,486	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	530,610,942	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	164,753,425	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	709,173
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,042,699,736	0
0.0	117114	Suku Cadang	41,677,088	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	496,197,770	0
0.0	131111	Tanah	506,815,456,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	324,840,672,940	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	287,858,614,087	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	3,086,204,000	0
0.0	134113	Jaringan	42,408,032,272	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	6,596,534,701	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,131,579,498	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3,483,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	267,907,646,000
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	50,049,696,614
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,488,729,749
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,515,063,644
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	68,249,500
0.0	138311	Properti Investasi	11,958,905,308	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	2,053,571,797
0.0	162151	Software	22,160,024,025	0
0.0	162161	Lisensi	1,723,042,756	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,584,805,550	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	446,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,850,560,630	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,850,560,630
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	20,924,333,512
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,055,728,718
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	695,657,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	5,263,770,052
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,313,043,828
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	446,500,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	10,041,610,954
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,203,038,150
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	12,656,825,486

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	548,303,661,162
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,744,775,929	0
0.0	313211	Transfer Keluar	7,894,921,880	0
0.0	391111	Ekuitas	0	886,769,537,641
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12,224,986	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	128,977,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	975,403,500
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	4,000,000	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	188,548,212
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,830,004
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	56,068,698
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	15,427,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	13,250,210,210	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	177,602	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	907,696,140	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	271,732,272	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	867,540,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,082,890,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	182,093,492	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	657,863,280	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,327,457,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	141,860,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	468,720,000	0
3.0	511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	5,568	0
3.0	511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	46,872,000	0
3.0	511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	5,241,600	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	8,568,456,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	2,977,745,004	0
3.0	511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	19,987,920	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,017,867,537	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	45,210	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	117,608,020	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	37,240,638	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	189,488,083	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	125,648,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	344,974,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	35,463,744	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	26,409,565,068	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,670,422,549	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	23,504,470,869	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,741,292	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	343,632,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,483,291,430	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,742,654,296	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	440,008,926,264	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,717,232,372	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,593,106	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,136,203,991	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	124,003,727	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	629,410,695	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	99,200,700	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,538,452,081	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	682,302,703	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,428,249,753	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,676,927	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	525,981,686	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	128,982,333	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,560,033,073	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,200,815,929	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,320,000	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	490,101,738	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,482,790,393	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,173,386,402	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	133,046,914	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	407,055,662	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	115,178,297	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	318,173,480	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	86,152,048	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,916,185,070	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,836,898	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	768,222	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	8,047,102	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	872,913,220	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	404,455	0
JUMLAH			1,849,975,188,774	1,849,975,188,774

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO
NIP 196705131988021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM
Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	12,656,825,486	0	12,656,825,486	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	530,610,942	856,618,430	(326,007,488)	(38.06)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	39,179,179	(39,179,179)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	164,753,425	84,402,845	80,350,580	95.20
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(709,173)	(23,763,818)	23,054,645	(97.02)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	164,044,252	60,639,027	103,405,225	170.53
Persediaan	2,580,574,594	3,638,633,109	(1,058,058,515)	(29.08)
JUMLAH ASET LANCAR	15,932,055,274	4,595,069,745	11,336,985,529	246.72
ASET TETAP				
Tanah	506,815,456,000	506,815,456,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	324,840,672,940	325,983,313,013	(1,142,640,073)	(0.35)
Gedung dan Bangunan	287,858,614,087	287,721,846,960	136,767,127	0.05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	45,494,236,272	45,494,236,272	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	30,728,114,199	38,661,377,769	(7,933,263,570)	(20.52)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,483,000	3,483,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(347,029,385,507)	(333,662,239,296)	(13,367,146,211)	4.01
JUMLAH ASET TETAP	848,711,190,991	871,017,473,718	(22,306,282,727)	(2.56)
Properti Investasi				
Properti Investasi	11,958,905,308	11,958,905,308	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2,053,571,797)	(1,938,393,500)	(115,178,297)	5.94
JUMLAH Properti Investasi	9,905,333,511	10,020,511,808	(115,178,297)	(1.15)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	25,467,872,331	25,357,373,651	110,498,680	0.44
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	446,500,000	0	446,500,000	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	10,344,831,450	(10,344,831,450)	(100.00)
Aset Lain-lain	8,850,560,630	16,406,312,177	(7,555,751,547)	(46.05)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(31,526,280,110)	(38,677,706,129)	7,151,426,019	(18.49)
JUMLAH ASET LAINNYA	3,238,652,851	13,430,811,149	(10,192,158,298)	(75.89)
JUMLAH ASET	877,787,232,627	899,063,866,420	(21,276,633,793)	(2.37)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,023,313,880	11,217,924,195	(2,194,610,315)	(19.56)
Utang Yang Belum Ditagihkan	10,041,610,954	0	10,041,610,954	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,203,038,150	1,076,404,584	126,633,566	11.76
Uang Muka dari KPPN	12,656,825,486	0	12,656,825,486	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA	32,924,788,470	12,294,328,779	20,630,459,691	167.80

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM
Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
PENDEK				
JUMLAH KEWAJIBAN	32,924,788,470	12,294,328,779	20,630,459,691	167.80
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	844,862,444,157	886,769,537,641	(41,907,093,484)	(4.73)
JUMLAH EKUITAS	844,862,444,157	886,769,537,641	(41,907,093,484)	(4.73)
JUMLAH EKUITAS	844,862,444,157	886,769,537,641	(41,907,093,484)	(4.73)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	877,787,232,627	899,063,866,420	(21,276,633,793)	(2.37)

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO
NIP 196705131988021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ESELON I : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM
Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,178,209,216	1,444,756,723	(266,547,507)	(18.449)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,178,209,216	1,444,756,723	(266,547,507)	(18.449)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,178,209,216	1,444,756,723	(266,547,507)	(18.449)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	62,724,871,637	55,968,475,253	6,756,396,384	12.072
Beban Persediaan	2,797,145,392	2,906,066,969	(108,921,577)	(3.748)
Beban Barang dan Jasa	494,487,365,279	392,577,636,907	101,909,728,372	25.959
Beban Pemeliharaan	3,478,279,139	8,843,008,818	(5,364,729,679)	(60.666)
Beban Perjalanan Dinas	2,718,237,667	24,723,146,758	(22,004,909,091)	(89.005)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	741,501	(741,501)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 ESELON I : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 2:05 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,715,783,196	15,367,295,256	348,487,940	2.268
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	404,455	80,306,702	(79,902,247)	(99.496)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	581,922,086,765	500,466,678,164	81,455,408,601	16.276
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(580,743,877,549)	(499,021,921,441)	(81,721,956,108)	16.376
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	128,977,000	810,379,873	(681,402,873)	(84.084)
Pendapatan Pelepasan Aset	128,977,000	810,379,873	(681,402,873)	(84.084)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56,068,698	364,035,953	(307,967,255)	(84.598)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	56,068,698	364,035,953	(307,967,255)	(84.598)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	185,045,698	1,174,415,826	(989,370,128)	(84.244)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(580,558,831,851)	(497,847,505,615)	(82,711,326,236)	16.614
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(580,558,831,851)	(497,847,505,615)	(82,711,326,236)	16.614

Keterangan :
FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO
NIP 196705131988021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tgl Data : 21/10/25 12:29 AM

Tgl Cetak : 21/10/25 7:48 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	886,769,537,641	886,568,911,912	200,625,729	0.02
SURPLUS/DEFISIT-LO	(580,558,831,851)	(497,847,505,615)	(82,711,326,236)	16.61
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(12,224,986)	(46,268,363)	34,043,377	(73.58)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	70,330,400	(70,330,400)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(12,224,986)	(139,700,857)	127,475,871	(91.25)
LAIN-LAIN	0	23,102,094	(23,102,094)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	538,663,963,353	480,398,527,843	58,265,435,510	12.13
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(41,907,093,484)	(17,495,246,135)	(24,411,847,349)	139.53
EKUITAS AKHIR	844,862,444,157	869,073,665,777	(24,211,221,620)	(2.79)

Keterangan :

FINAL

Jakarta Pusat, 21 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

TATANG GARJITO

NIP 196705131988021001

**KERTAS KERJA TELAAH
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
TRIWULAN III TA 2025**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN TA 2025

Kode dan Nama K/L : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan		√	Tidak
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE (580.558.831.851) = (580.558.831.851)	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca 844.862.444.157 = 844.862.444.157	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas 877.787.232.627 = 32.924.788.470 + 844.862.444.157	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak



9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Ya
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya



3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak



2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?	√		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN 24.087.156.699 = 24.087.156.699	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya



8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" 886.769.537.641 + (41.907.093.484)= 844.862.444.157	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	-	-	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak



	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak



LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

1. Penjelasan pada kategori **PENGECEKAN NERACA**, poin nomor 7 "Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?" bahwa aset pada triwulan III TA 2025 dibandingkan dengan aset Audited TA 2024 tidak mengalami peningkatan dikarenakan penambahan nilai Aset pada Triwulan III TA 2025 lebih kecil dibanding penghapusan, transfer keluar ATR dan Alih Status ke Kementerian Sekretariat Negara yang terjadi pada Semester I TA 2025. Hal ini juga dampak dari efisiensi anggaran
2. Penjelasan pada kategori **PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL**, sub Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit), poin nomor 4 "Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)" bahwa nilai Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin pada Neraca Percobaan Akrua ada di Debit (D) dikarenakan adanya pendapatan yang masih harus diterima atas Sewa Peralatan dan Mesin berupa Kontainer oleh Koperasi Konstitusi untuk periode 1 Agustus 2025 sd 31 Juli 2027 sebesar Rp24.000.000,- yang pembayarannya dilakukan di bulan Oktober 2025

Penyusun LKKL,



(Allita Prisantama)

NIP 19950129 201801 2 001

Jakarta, 23 Oktober 2025

Penelaah,



(Afrianto Amri)

NIP 19840415 201801 1 001

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Laporan Keuangan,



(Akbar Anatajaya)

NIP 19801017 200604 1 004



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature
mk710727730251023093215

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN SEPTEMBER 2025**



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: September 2025

Kementerian/Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-077.01.1.653910/2025

Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT KPPN : (018) Jakarta I

Satuan Kerja : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 4.350.181.515,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00060/KWTI/653910/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	902.107.548,00	94.597.833.601,00	91.149.759.634,00	4.350.181.515,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	770.942.620,00	49.796.894.843,00	46.406.548.491,00	4.161.288.972,00
	2. BP UM (Voucher)	112.984.000,00	20.235.208.510,00	20.176.413.510,00	171.779.000,00
	3. BP BPP	18.180.928,00	24.565.730.248,00	24.566.797.633,00	17.113.543,00
B	BP Selain Kas	902.107.548,00	29.421.608.705,00	25.973.534.738,00	4.350.181.515,00
	1. BP UP*)	902.107.548,00	2.258.937.375,00	2.483.199.200,00	677.845.723,00
	2. BP TUP*)	0,00	23.840.018.486,00	20.167.682.694,00	3.672.335.792,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	1.254.103.789,00	1.254.103.789,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.068.549.055,00	2.068.549.055,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 1.182.154.277,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 7.124.489.694,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	4.161.288.972,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	4.161.288.972,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	4.161.288.972,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	4.161.288.972,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	677.845.723,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	1.182.154.277,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	1.860.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	1.860.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	3.672.335.792,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	7.124.489.694,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	10.796.825.486,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	10.796.825.486,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



TATANG GARJITO
NIP 196705131988021001

KOTA JAKARTA PUSAT, September 2025

Bendahara Pengeluaran



DESSY CITRAWATY MURSITO
NIP 198412042010122001

MEMO PENYESUAIAN SEMESTER I TA 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.001
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.001	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.198.750	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		162.198.750

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa manfaat anti virus Kaspersky PT Nusantara Compnet Integrator periode Januari s.d. Maret 2025 sebesar Rp162.198.750,- (648.795.000-(9/12*648.795.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025 
--	--	---



Ditandatangani secara elektronik
 Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR

Digital Signature
 mk-785715582250725063742



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**Masa manfaat anti virus Kaspersky
periode 07 Maret 2024 – 06 Maret 2025**

Rp 648.795.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	APRIL	54.066.250	486.596.250
	MEI	54.066.250	
	JUNI	54.066.250	
	JULI	54.066.250	
	AGUSTUS	54.066.250	
	SEPTEMBER	54.066.250	
	OKTOBER	54.066.250	
2025	NOVEMBER	54.066.250	162.198.750
	DESEMBER	54.066.250	
	JANUARI	54.066.250	
	FEBRUARI	54.066.250	
	MARET	54.066.250	
	JUMLAH	648.795.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.002
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.002	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.806.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		8.806.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa manfaat Lisense GeoTrust TrueBusinessID Wildcard periode Januari s.d. Agustus 2025 sebesar Rp8.806.000,- (13.209.000-(4/12*13.209.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Masa manfaat Lisensi GeoTrust TrueBusinessID
Wildcard (Pemeliharaan ICT)
(18 September 2024 - 17 September 2025)
mkri.id**

Rp13.209.000

		Rp	1.100.750	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	SEPTEMBER	Rp1.100.750		
	OKTOBER	Rp1.100.750		
	NOVEMBER	Rp1.100.750		
	DESEMBER	Rp1.100.750		
2025	JANUARI	Rp1.100.750		
	FEBRUARI	Rp1.100.750		
	MARET	Rp1.100.750		
	APRIL	Rp1.100.750		
	MEI	Rp1.100.750		
	JUNI	Rp1.100.750		
	JULI	Rp1.100.750		
	AGUSTUS	Rp1.100.750		
	JUMLAH	Rp13.209.000		
			8.806.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.003
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.003	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.930.400	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		2.930.400

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan aplikasi Grammarly Premium periode Januari s.d. April 2025 sebesar Rp2.930.400,- (8.791.200-(8/12*8.791.200)) (SPBy 00628/PB/653910/2024)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Masa Langganan Aplikasi Grammarly Premium
(Mei 2024 s.d. Mei 2025)**

Rp8.791.200

		Rp	732.600	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	MEI	732.600		
	JUNI	732.600		521219
	JULI	732.600		
	AGUSTUS	732.600		
	SEPTEMBER	732.600		
	OKTOBER	732.600		
	NOVEMBER	732.600		
	DESEMBER	732.600		2.930.400
2025	JANUARI	732.600		
	FEBRUARI	732.600		
	MARET	732.600		
	APRIL	732.600		
	JUMLAH	Rp8.791.200		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.004
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.004	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	898.590	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		898.590

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa manfaat Lisense Apple Developer Program periode Januari s.d Juli 2025 sebesar Rp898.590,-
 (1.540.440-(5/12*1.540.440))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Masa manfaat Lisensi Apple Developer Program
(Agustus 2024 s.d. Juli 2025)**

1.540.440

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	AGUSTUS	128.370		
	SEPTEMBER	128.370		
	OKTOBER	128.370		
	NOVEMBER	128.370		
	DESEMBER	128.370		
2025	JANUARI	128.370	Rp	898.590
	FEBRUARI	128.370		
	MARET	128.370		
	APRIL	128.370		
	MEI	128.370		
	JUNI	128.370		
	JULI	128.370		
	JUMLAH	Rp1.540.440		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.005
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.005	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	167.758	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		167.758

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan Freepik periode Januari 2025 sebesar Rp167.758,- (2.013.098-(11/12*2.013.098))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Freepik Mahkamah Konstitusi TA 2024
(Februari 2024 s.d. Februari 2025)**

Rp 2.013.098

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	FEBRUARI	167.758	521219
	MARET	167.758	
	APRIL	167.758	
	MEI	167.758	
	JUNI	167.758	
	JULI	167.758	
	AGUSTUS	167.758	
	SEPTEMBER	167.758	
	OKTOBER	167.758	
	NOVEMBER	167.759	
	DESEMBER	167.759	
2025	JANUARI	167.758	167.758
	JUMLAH	Rp2.013.098	2.013.096



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.006
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.006	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.400.457	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		2.400.457

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan Akun Envanto periode Januari s.d. Juli 2025 sebesar Rp2.400.475,- (4.115.100-(5/12*4.115.100))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Akun Envanto Mahkamah Konstitusi TA 2024
(Agustus 2024 - Juli 2025)**

Rp 4.115.100

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	AGUSTUS	342.925	
	SEPTEMBER	342.925	521219
	OKTOBER	342.925	
	NOVEMBER	342.925	
	DESEMBER	342.925	2.400.475
2025	JANUARI	342.925	
	FEBRUARI	342.925	
	MARET	342.925	
	APRIL	342.925	
	MEI	342.925	
	JUNI	342.925	
	JULI	342.925	
	JUMLAH	Rp4.115.100	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.007
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.007	D	522141	Beban Sewa	151.250.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		151.250.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Januari s.d. Oktober 2025 sebesar Rp151.250.000,- (181.500.000-(11/12*181.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach
(November 2024 - Oktober 2025)**

Rp 181.500.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	NOVEMBER	15.125.000	151.250.000
	DESEMBER	15.125.000	
2025	JANUARI	15.125.000	
	FEBRUARI	15.125.000	
	MARET	15.125.000	
	APRIL	15.125.000	
	MEI	15.125.000	
	JUNI	15.125.000	
	JULI	15.125.000	
	AGUSTUS	15.125.000	
	SEPTEMBER	15.125.000	
	OKTOBER	15.125.000	
	JUMLAH	Rp181.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.008
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.008	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	527.307	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		527.307

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Akun Foreign Policy periode Januari s.d. Februari 2025 sebesar Rp527.307,- (3.163.841-(10/12*3.163.841))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Akun Foreign Policy TA 2024
(Februari 2024 s.d. Februari 2025)**

Rp

3.163.841

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	MARET	263.654	521211
	APRIL	263.654	
	MEI	263.654	
	JUNI	263.654	
	JULI	263.654	
	AGUSTUS	263.653	
	SEPTEMBER	263.653	527.307
	OKTOBER	263.653	
	NOVEMBER	263.653	
	DESEMBER	263.653	
2025	JANUARI	263.653	
	FEBRUARI	263.653	
	JUMLAH	Rp3.163.841	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.009
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.009	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	316.400	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		316.400

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Aplikasi The Guardian App periode Januari.d. Februari 2025 sebesar Rp316.400,-
 (1.898.400-(10/12*1.898.400)))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Aplikasi The Guardian
App TA 2024
(Februari 2024 s.d. Februari 2025)**

Rp

1.898.400

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	MARET	158.200	521211
	APRIL	158.200	
	MEI	158.200	
	JUNI	158.200	
	JULI	158.200	
	AGUSTUS	158.200	
	SEPTEMBER	158.200	316.400
	OKTOBER	158.200	
	NOVEMBER	158.200	
	DESEMBER	158.200	
2025	JANUARI	158.200	
	FEBRUARI	158.200	
	JUMLAH	Rp1.898.400	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.010
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.010	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.083.750	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		18.083.750

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Lisensi Redhat periode Januari 2025 sebesar Rp18.083.750,- (217.005.000-(11/12*217.005.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Lisensi Redhat TA 2024
(22 Januari 2024 – 21 Januari 2024)**

Rp

217.005.000

		Rp	18.083.750	
		BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024		FEBRUARI	18.083.750	
		MARET	18.083.750	523121
		APRIL	18.083.750	
		MEI	18.083.750	
		JUNI	18.083.750	
		JULI	18.083.750	
		AGUSTUS	18.083.750	
		SEPTEMBER	18.083.750	
		OKTOBER	18.083.750	
		NOVEMBER	18.083.750	
		DESEMBER	18.083.750	18.083.750
2025		JANUARI	18.083.750	
		JUMLAH	Rp217.005.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.011
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.011	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.327.750	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		70.327.750

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Lisensi Palo Alto periode Januari 2025 sebesar Rp70.327.750,- (843.933.000- (11/12*843.933.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025
---	---	--



**Langganan Lisensi Palo Alto TA 2024
(16 Januari 2024 – 21 Januari 2025)**

Rp

843.933.000

		Rp	70.327.750	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	FEBRUARI	70.327.750		
	MARET	70.327.750		523121
	APRIL	70.327.750		
	MEI	70.327.750		
	JUNI	70.327.750		
	JULI	70.327.750		
	AGUSTUS	70.327.750		
	SEPTEMBER	70.327.750		
	OKTOBER	70.327.750		
	NOVEMBER	70.327.750		
	DESEMBER	70.327.750		70.327.750
	JANUARI	70.327.750		
2025	JUMLAH	Rp843.933.000		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.012
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.012	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.741.250	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		8.741.250

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Lisensi Veeam periode Januari 2025 sebesar Rp8.741.250,- (104.895.000- (11/12*104.895.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama
 NIP : 199501292018012001
 Tanggal : 1 Januari 2025

Disetujui oleh : Endrizal
 NIP : 197505232006041003
 Tanggal : 1 Januari 2025

Direkam oleh : Afrianto Amri
 NIP : 198404152018011001
 Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Lisensi Vecam TA 2024
(29 Januari 2024 – 28 Januari 2025)**

Rp

104.895.000

		Rp	8.741.250	
		BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024		FEBRUARI	8.741.250	
		MARET	8.741.250	523121
		APRIL	8.741.250	
		MEI	8.741.250	
		JUNI	8.741.250	
		JULI	8.741.250	
		AGUSTUS	8.741.250	
		SEPTEMBER	8.741.250	
		OKTOBER	8.741.250	
		NOVEMBER	8.741.250	
		DESEMBER	8.741.250	8.741.250
2025		JANUARI	8.741.250	
		JUMLAH	Rp104.895.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.013
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.013	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	625.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		625.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan X Premium periode Januari s.d. Juni 2025 sebesar Rp625.000,- (1.250.000- (6/12*1.250.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan X Premium TA 2024
(9 Juli 2024 – 9 Juli 2025)**

Rp

1.250.000

		Rp	1.250.000
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	JULI	104.167	
	AGUSTUS	104.167	
	SEPTEMBER	104.167	
	OKTOBER	104.167	
	NOVEMBER	104.167	
	DESEMBER	104.167	
2025	JANUARI	104.167	
	FEBRUARI	104.167	
	MARET	104.166	
	APRIL	104.166	
	MEI	104.166	
	JUNI	104.166	
	JUMLAH	Rp1.250.000	

521219

104.167

625.000

937.500



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.014
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.014	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.950.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		160.950.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa Langganan Lisensi Iron Port periode Januari s.d. Agustus 2025 sebesar Rp160.950.000,-
 (241.425.000-(4/12*241.425.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Lisensi Iron Port TA 2024
(28 Agustus 2024 – 27 Agustus 2025)**

Rp

241.425.000

		Rp	20.118.750	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	SEPTEMBER	20.118.750		
	OKTOBER	20.118.750		523121
	NOVEMBER	20.118.750		
	DESEMBER	20.118.750		160.950.000
2025	JANUARI	20.118.750		
	FEBRUARI	20.118.750		
	MARET	20.118.750		
	APRIL	20.118.750		
	MEI	20.118.750		
	JUNI	20.118.750		
	JULI	20.118.750		
	AGUSTUS	20.118.750		
	JUMLAH	Rp241.425.000		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.015
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.015	D	522141	Beban Sewa	42.020.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		42.020.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa tambahan langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Januari s.d. November 2025 sebesar Rp42.020.000,- (42.020.000-(0/11*42.020.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025
---	---	--



**Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach
(Januari - November 2025)**

Rp 42.020.000

2025

BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
JANUARI	3.820.000
FEBRUARI	3.820.000
MARET	3.820.000
APRIL	3.820.000
MEI	3.820.000
JUNI	3.820.000
JULI	3.820.000
AGUSTUS	3.820.000
SEPTEMBER	3.820.000
OKTOBER	3.820.000
NOVEMBER	3.820.000
JUMLAH	Rp42.020.000

42.020.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.016
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.016	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.500.000	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		99.500.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan Lisensi A-Flex 3 periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp99.500.000,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025
---	---	--



**Langganan Lisensi A-Flex 3 TA 2025
(19 Januari 2025 – 18 Januari 2026)**

Rp

99.500.000

		Rp	99.500.000	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2025	FEBRUARI	8.291.667		
	MARET	8.291.667		
	APRIL	8.291.667		
	MEI	8.291.667		
	JUNI	8.291.667		
	JULI	8.291.667		
	AGUSTUS	8.291.667		
	SEPTEMBER	8.291.667		
	OKTOBER	8.291.666		
	NOVEMBER	8.291.666		
	DESEMBER	8.291.666		
2026	JANUARI	8.291.666		
	JUMLAH	Rp99.500.000		

521219

58.041.667



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.017
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.017	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.875.000	
	K	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)		126.875.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa masa langganan Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub periode Januari s.d. Juli 2025 sebesar Rp126.875.000,- (217.500.000-(5/12*217500000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub TA 2025
(08 Agustus 2024 – 07 Agustus 2025)**

Rp

217.500.000

		Rp	217.500.000	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	AGUSTUS	18.125.000		
	SEPTEMBER	18.125.000		
	OKTOBER	18.125.000		
	NOVEMBER	18.125.000		
	DESEMBER	18.125.000		
2025	JANUARI	18.125.000		
	FEBRUARI	18.125.000		
	MARET	18.125.000		
	APRIL	18.125.000		
	MEI	18.125.000		
	JUNI	18.125.000		
	JULI	18.125.000		
	JUMLAH	Rp217.500.000		

521219

18.125.000

126.875.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.022
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440267039

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.022	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	2.201.500	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2.201.500

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa manfaat Lisense GeoTrust TrueBusinessID Wildcard periode Juli s.d. Agustus 2025 sebesar Rp2.201.500,- (13.209.000-(10/12*13.209.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Masa manfaat Lisensi GeoTrust TrueBusinessID
Wildcard (Pemeliharaan ICT)
(18 September 2024 - 17 September 2025)
mkri.id**

Rp13.209.000

		Rp	1.100.750	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	SEPTEMBER	Rp1.100.750		
	OKTOBER	Rp1.100.750		
	NOVEMBER	Rp1.100.750		
	DESEMBER	Rp1.100.750		
2025	JANUARI	Rp1.100.750		
	FEBRUARI	Rp1.100.750		
	MARET	Rp1.100.750		
	APRIL	Rp1.100.750		
	MEI	Rp1.100.750		
	JUNI	Rp1.100.750		
	JULI	Rp1.100.750		
	AGUSTUS	Rp1.100.750		
	JUMLAH	Rp13.209.000		
				8.806.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP023
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440267222

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP023	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	2.401.095	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		2.401.095

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan aplikasi Grammarly Premium periode Juli 2025 s.d. April 2026 sebesar Rp2.401.095,- (2.881.314-(2/12*2.881.314))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Masa Langganan Aplikasi Grammarly Premium
(14 Mei 2025 s.d. 14 Mei 2026)**

Rp2.881.314

		Rp	240.110	
		BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	MEI		240.110	
	JUNI		240.110	521219
	JULI		240.110	
	AGUSTUS		240.110	
	SEPTEMBER		240.110	
	OKTOBER		240.110	
	NOVEMBER		240.109	
	DESEMBER		240.109	960.438
2026	JANUARI		240.109	
	FEBRUARI		240.109	
	MARET		240.109	
	APRIL		240.109	
	JUMLAH		Rp2.881.314	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.024
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440267963

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.024	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	128.370	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		128.370

Jurnal penyesuaian atas sisa masa manfaat Lisense Apple Developer Program periode Juli 2025 sebesar Rp128.370,-
 (1.540.440-(11/12*1.540.440))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Masa manfaat Lisensi Apple Developer Program
(Agustus 2024 s.d. Juli 2025)**

1.540.440

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
2024	AGUSTUS	128.370
	SEPTEMBER	128.370
	OKTOBER	128.370
	NOVEMBER	128.370
	DESEMBER	128.370
2025	JANUARI	128.370
	FEBRUARI	128.370
	MARET	128.370
	APRIL	128.370
	MEI	128.370
	JUNI	128.370
	JULI	128.370
	JUMLAH	Rp1.540.440

Rp 898.590



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.025
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440273295

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.025	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	1.322.775	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		1.322.775

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Freepik periode Juli 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp1.322.775,- (2.267.614-(5/12*2.267.614))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Freepik Mahkamah Konstitusi TA 2024
(Februari 2025 s.d. Januar 2026)**

Rp 2.267.614

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	188.968	521219
	MARET	188.968	
	APRIL	188.968	
	MEI	188.968	
	JUNI	188.968	
	JULI	188.968	
	AGUSTUS	188.968	
	SEPTEMBER	188.968	
	OKTOBER	188.968	
	NOVEMBER	188.968	
	DESEMBER	188.967	
2026	JANUARI	188.967	2.267.616
	JUMLAH	Rp2.267.614	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.026
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440274174

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.026	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	342.925	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		342.925

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Akun Envanto periode Juli 2025 sebesar Rp342.925,- (4.115.100- (11/12*4.115.100))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Akun Envanto Mahkamah Konstitusi TA 2024
(Agustus 2024 - Juli 2025)**

Rp 4.115.100

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	AGUSTUS	342.925	
	SEPTEMBER	342.925	521219
	OKTOBER	342.925	
	NOVEMBER	342.925	
	DESEMBER	342.925	2.400.475
2025	JANUARI	342.925	
	FEBRUARI	342.925	
	MARET	342.925	
	APRIL	342.925	
	MEI	342.925	
	JUNI	342.925	
	JULI	342.925	
	JUMLAH	Rp4.115.100	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.027
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440274390

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.027	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	60.500.000	
	K	522141	Beban Sewa		60.500.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Juli s.d. Oktober 2025 sebesar Rp60.500.000,- (181.500.000-(8/12*181.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach
(November 2024 - Oktober 2025)**

Rp 181.500.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	NOVEMBER	15.125.000	
	DESEMBER	15.125.000	
2025	JANUARI	15.125.000	151.250.000
	FEBRUARI	15.125.000	
	MARET	15.125.000	
	APRIL	15.125.000	
	MEI	15.125.000	
	JUNI	15.125.000	
	JULI	15.125.000	
	AGUSTUS	15.125.000	
	SEPTEMBER	15.125.000	
	OKTOBER	15.125.000	
	JUMLAH	Rp181.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.028
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440274744

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.028	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	40.237.500	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		40.237.500

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa Langganan Lisensi Iron Port periode Juli s.d. Agustus 2025 sebesar Rp40.237.500,-
 (241.425.000-(10/12*241.425.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi Iron Port TA 2024
(28 Agustus 2024 – 27 Agustus 2025)**

Rp

241.425.000

		Rp	20.118.750	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	SEPTEMBER	20.118.750		
	OKTOBER	20.118.750		523121
	NOVEMBER	20.118.750		
	DESEMBER	20.118.750		160.950.000
2025	JANUARI	20.118.750		
	FEBRUARI	20.118.750		
	MARET	20.118.750		
	APRIL	20.118.750		
	MEI	20.118.750		
	JUNI	20.118.750		
	JULI	20.118.750		
	AGUSTUS	20.118.750		
	JUMLAH	Rp241.425.000		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.029
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440275532

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.029	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	19.100.000	
	K	522141	Beban Sewa		19.100.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa tambahan langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Juli s.d. November 2025 sebesar Rp19.100.000,- (42.020.000-(6/11*42.020.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach
(Januari - November 2025)**

Rp 42.020.000

2025

BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
JANUARI	3.820.000
FEBRUARI	3.820.000
MARET	3.820.000
APRIL	3.820.000
MEI	3.820.000
JUNI	3.820.000
JULI	3.820.000
AGUSTUS	3.820.000
SEPTEMBER	3.820.000
OKTOBER	3.820.000
NOVEMBER	3.820.000
JUMLAH	Rp42.020.000

42.020.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.030
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440281304

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.030	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	58.041.667	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		58.041.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Lisensi A-Flex 3 periode Juli 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp58.041.667,- (99.500.000-(5/12*99.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi A-Flex 3 TA 2025
(19 Januari 2025 – 18 Januari 2026)**

Rp

99.500.000

		Rp	99.500.000	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2025	FEBRUARI	8.291.667		
	MARET	8.291.667		521219
	APRIL	8.291.667		
	MEI	8.291.667		
	JUNI	8.291.667		58.041.667
	JULI	8.291.667		
	AGUSTUS	8.291.667		
	SEPTEMBER	8.291.667		
	OKTOBER	8.291.666		
	NOVEMBER	8.291.666		
	DESEMBER	8.291.666		
2026	JANUARI	8.291.666		
	JUMLAH	Rp99.500.000		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.031
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440283851

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.031	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	18.125.000	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		18.125.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub periode Juli 2025 sebesar Rp18.125.000,-
 (217.500.000-(11/12*217500000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub TA 2025
(08 Agustus 2024 – 07 Agustus 2025)**

Rp

217.500.000

		Rp	217.500.000	
	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN		
2024	AGUSTUS	18.125.000		
	SEPTEMBER	18.125.000		521219
	OKTOBER	18.125.000		
	NOVEMBER	18.125.000		
	DESEMBER	18.125.000		18.125.000
2025	JANUARI	18.125.000		126.875.000
	FEBRUARI	18.125.000		
	MARET	18.125.000		
	APRIL	18.125.000		
	MEI	18.125.000		
	JUNI	18.125.000		
	JULI	18.125.000		
	JUMLAH	Rp217.500.000		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.032
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440285606

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.032	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	9.041.667	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		9.041.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Tableau Creator periode Juli 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp9.041.667,- (15.500.000-(5/12*15.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi Tableau Creator
(Januari 2025 s.d. Januari 2026)**

Rp

15.500.000

Rp 15.500.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	1.291.667	
	MARET	1.291.667	521219
	APRIL	1.291.667	
	MEI	1.291.667	
	JUNI	1.291.667	1.291.667
	JULI	1.291.667	
	AGUSTUS	1.291.667	
	SEPTEMBER	1.291.667	
	OKTOBER	1.291.666	
	NOVEMBER	1.291.666	
	DESEMBER	1.291.666	
2026	JANUARI	1.291.666	
	JUMLAH	Rp15.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.033
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440286654

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.033	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	10.721.667	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		10.721.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Qontak (WA Blast) periode Juli 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp10.721.667,- (18.380.000-(5/12*18.380.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi Qontak (WA Blast)
(Januari 2025 s.d. Januari 2026)**

Rp

18.380.000

Rp 18.380.000

2025

BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
FEBRUARI	1.531.667
MARET	1.531.667
APRIL	1.531.667
MEI	1.531.667
JUNI	1.531.667
JULI	1.531.667
AGUSTUS	1.531.667
SEPTEMBER	1.531.667
OKTOBER	1.531.666
NOVEMBER	1.531.666
DESEMBER	1.531.666
2026	JANUARI
	JUMLAH
	Rp18.380.000

521219

1.531.667



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.034
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440287698

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.034	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	42.057.345	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		42.057.345

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Zoom periode Juli 2025 s.d. April 2026 sebesar Rp42.057.345,- (50.468.814-(2/12*50.468.814))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Langganan Lisensi Zoom
(April 2025 s.d. April 2026)**

Rp

50.468.814

Rp 50.468.814

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	MEI	4.205.735	
	JUNI	4.205.735	521219
	JULI	4.205.735	
	AGUSTUS	4.205.735	
	SEPTEMBER	4.205.735	4.205.735
	OKTOBER	4.205.735	
	NOVEMBER	4.205.734	
	DESEMBER	4.205.734	
2026	JANUARI	4.205.734	
	FEBRUARI	4.205.734	
	MARET	4.205.734	
	APRIL	4.205.734	
	JUMLAH	Rp50.468.814	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JU.001
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423223294, GLP-653910-423225493

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.001	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.815.646	
	K	115212	Piutang Lainnya		2.815.646
	D	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	14.078	
	K	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB		14.078

Keterangan:

Jurnal penyesuaian berupa realisasi pembayaran piutang atas kelebihan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan tanggal 31 Desember 2024 (SPBy 4647, 4650, 4729, 4740, 4768, 4769, 4771, 4773, 4775, 4875, 4781, 4782) sebesar Rp 2.815.646,- dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp14.078,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025 
--	--	---



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature
mk-697816979250725064139

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.002
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 3 Februari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-423227549, GLP-653910-423228968

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☒	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.002	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	58.128.099	
	K	115212	Piutang Lainnya		58.128.099
	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	290.640	
	K	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		290.640

Keterangan:

Jurnal penyesuaian berupa realisasi pembayaran piutang belanja TA 2020 karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan jasa pelaksana renovasi sidang panel lantai 4 Gedung 1 MK sebesar Rp54.409.599,- dan kekurangan volume pada pekerjaan modifikasi stage hakim ruang sidang panel II lantai 4 Gedung 1 MK TA 2020 (SPM 5228) sebesar Rp3.718.500,- CV Sindang Jaya (LHP BPK Tahun 2021) sesuai dengan NTPN No F67393CIFT83V0J1

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 3 Februari 2025	Tanggal : 3 Februari 2025	Tanggal : 3 Februari 2025





Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250202079841
Tanggal Billing	: 02-02-2025 13:07:19
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-02-2025 13:07:19
Tanggal Bayar	: 03-02-2025 07:26:17
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Mahkamah Konstitusi
Kementerian/Lembaga	: 077 - MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Unit Eselon I	: 01 - Mahkamah Konstitusi RI
Satuan Kerja	: 653910 - MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Total Disetor	: 58.128.099 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 250203001653
NTPN	: F67393CIFT83V0J1

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913-Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 58.128.099 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Modal ats (TLHP BKP) kelebihan pembayaran pekerjaan di gedung 1 MK pd TA 2020 an. CV. Sindang Jaya



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.033
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-446600014

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.033	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	11.759.100	
	K	115212	Piutang Lainnya		11.759.100

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas penghapusan piutang atas CV. Mora Jaya sebesar Rp11.759.100,- dengan kualitas piutang macet, dikarenakan Direktur perusahaan meninggal

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.034
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-446600224

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.066	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	11.700.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		11.700.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas penghapusan piutang PT. Asanisi Rejeki sebesar Rp11.700.000,-dengan kualitas piutang macet, dikarenakan Direktur perusahaan meninggal

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.004
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 31 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-427150515

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☒	Jurnal Umum
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.004	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	11.276.550	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		11.276.550

Keterangan:

Koreksi Kuantitas dengan cara input Perolehan Lainnya (A.C. Split NUP 591) atas Pengadaan A.C. Split dikediaman Hakim (SPM 00178A)

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 31 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 31 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 31 Januari 2025 
---	---	--



Ditandatangani secara elektronik
 Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature
 mk573363035250725064418

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00178T	Tanggal 06-Mar-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 111.331.600,00		
**** SERATUS SEBELAS JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : GUP-KKP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.532111.07701WA.3369EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		111.331.600,00
Jumlah Pengeluaran		111.331.600,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		111.331.600,00
Kepada: Nomor : 831096 Nama Supplier : MAHKAMAH KONSTITUSI RI NPWP1 : 0001238732025000 NPWP2 : 0001238732025000 NOP : Uraian : Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Keperluan Belanja Moda Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 650596539101000 Nama Pemilik : BPG 018 MAHKAMAH KONSTITUSI RI Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		
KOTA JAKARTA PUSAT, 06 Maret 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen		
		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
BUDI WIJAYANTO NIP 198104082006041007		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.030
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 31 Mei 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-438288445

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.030	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	15.200.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		15.200.000

Keterangan:

Koreksi Kuantitas dengan cara input Perolehan Lainnya (Uninterruptible Power Supply (UPS) NUP 408-411 atas Pengadaan UPS APC BX2200MI-MS (SPBy 00490/PB/653910/2025)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 31 Mei 2025	Tanggal : 31 Mei 2025	Tanggal : 31 Mei 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Mei 2025

Nomor : 00490/PB/653910/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 15.200.000,00

Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : PT ACCESS LINTAS SOLUSI

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa UPS APC BX2200MI-MS berdasarkan kuitansi nomor ALS/2025/05/002 tanggal 05 Mei 2025.

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 077.01.WA.3369.EBB.532111

Kode : 077.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA JAKARTA PUSAT , 14 Mei 2025

-

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

IRVAN AFRIALDI

.....

BUDI WIJAYANTO

NIP 197804042006041005

.....

NIP 198104082006041007

Dicetak pada tanggal 20 Mei 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.031
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-446588783

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.068	D	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.321.864	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		1.321.864

Keterangan:

Koreksi beban atas pengadaan Paloma 5139 Rak Tempat Sabun Shampoo Dinding Toilet Kamar Mandi sebanyak 4 pcs, semula menggunakan Beban Keperluan Perkantoran menjadi Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (SPM 00141A)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00141T	Tanggal 17-Feb-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 12.228.534,00		
**** DUA BELAS JUTA DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : GUP-KKP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.521111.07701WA.3369EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		12.228.534,00
Jumlah Pengeluaran		12.228.534,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		12.228.534,00
Kepada: Nomor : 831096 Nama Supplier : MAHKAMAH KONSTITUSI RI NPWP1 : 0001238732025000 NPWP2 : 0001238732025000 NOP : Uraian : Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Keperluan Belanja Barang Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 650596539101000 Nama Pemilik : BPG 018 MAHKAMAH KONSTITUSI RI Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		KOTA JAKARTA PUSAT, 17 Februari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen 
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. #2311g Aw0T0CQ0M		BUDI WIJAYANTO NIP 198104082006041007



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.069
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-446588999

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.069	D	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	808.406	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		808.406

Keterangan:

Koreksi Kuantitas Barang dari Penatausahaan BMN atas Pengadaan alat perekam soundcard (SPM 00651A)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00141T

Tanggal 17-Feb-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 12.228.534,00

**** DUA BELAS JUTA DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran : 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : GUP-KKP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

653910.018.521111.07701WA.3369EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

12.228.534,00

Jumlah Pengeluaran

12.228.534,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

12.228.534,00

Kepada:

Nomor : 831096

Nama Supplier : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

NPWP1 : 0001238732025000

NPWP2 : 0001238732025000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening : 650596539101000

Nama Pemilik : BPG 018 MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

#2311g Aw0T1GQ0M

KOTA JAKARTA PUSAT, 17 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



BUDI WIJAYANTO
NIP 198104082006041007



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.022
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 17 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423701324

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.022	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	1.041.787.222	
	K	522111	Beban Langganan Listrik		1.041.787.222

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran tagihan biaya langganan listrik Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2024 yang dibayarkan di Januari 2025 sebesar Rp1.041.787.722,- (SPM 00058T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 17 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 17 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 17 Januari 2025 
---	---	--



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSRé



Digital Signature
mk1380693432250725065127

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00058T

Tanggal 10-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.041.787.222,00

**** SATU MILYAR EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 17-Jan-2025
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

653910.018.522111.07701WA.3369EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

1.041.787.222,00

Jumlah Pengeluaran

1.041.787.222,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

1.041.787.222,00

Kepada:

Nomor : 3154
Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO)
NPWP1 : 0010016293051000
NPWP2 : 0001238732025000
NOP :
Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2025 untuk 10 invoice

Bank / Pos : BPD DKI
Rekening : 9901235400000000
Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI
KEBAYORAN BARU

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Jakarta, 10 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



BUDI WIJAYANTO
NIP 198104082006041007



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.023
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 17 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423703581

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.023	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	15.418.614	
	K	522111	Beban Langganan Listrik		15.418.614

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran tagihan biaya langganan telepon Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2024 yang dibayarkan di Januari 2025 sebesar Rp15.418.614,- (SPM 00062T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 17 Januari 2025	Tanggal : 17 Januari 2025	Tanggal : 17 Januari 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00062T	Tanggal 10-Jan-2025	Halaman 1 dari 5
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 15.418.614,00		
**** LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT BELAS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 17-Jan-2025 Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.522112.07701WA.3369EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		15.418.614,00
Jumlah Pengeluaran		15.418.614,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		15.418.614,00
Kepada: Nomor : 2536 Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK NPWP1 : 0010000131093000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 64 invoice Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 120101000014303 Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE Alamat : Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No.12		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Jakarta, 10 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen BUDI WIJAYANTO NIP 198104082006041007		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.024
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 17 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423705366

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.024	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	33.342.180	
	K	522141	Beban Sewa		33.342.180

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran tagihan biaya sewa internet Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2024 yang dibayarkan di Januari 2025 sebesar Rp33.342.180,- (SPM 00060T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 17 Januari 2025	Tanggal : 17 Januari 2025	Tanggal : 17 Januari 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00060T

Tanggal 10-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 33.342.180,00

**** TIGA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-077.01.1.653910/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 17-Jan-2025
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

653910.018.522141.07701WA.3369EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

33.342.180,00

Jumlah Pengeluaran

33.342.180,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

33.342.180,00

Kepada:

Nomor : 2536

Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

NPWP1 : 0010000131093000

NPWP2 : 0001238732025000

NOP :

Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 16 invoice

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening : 120101000014303

Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE

Alamat : Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No.12

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

#23jHtgyfCE4NTQ=

KOTA JAKARTA PUSAT, 10 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Nanang Subekti
NIP 197411182006041002



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.025
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 30 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423709315

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.025	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	705.093	
	K	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		705.093

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja JF PPBJ a.n. Jeffry Irwansyah bulan Desember 2024 sebesar Rp705.093,- (SPM 00102T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Januari 2025	Tanggal : 30 Januari 2025	Tanggal : 30 Januari 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00102T	Tanggal 27-Jan-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 673.088,00		
**** ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Kekurangan Tunjangan Kinerja Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.512411.07701WA.3367EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		705.093,00
Jumlah Pengeluaran		705.093,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		32.005,00
Jumlah Potongan		32.005,00
TOTAL PEMBAYARAN		673.088,00
Kepada: Nomor : 831096 Nama Supplier : MAHKAMAH KONSTITUSI RI NPWP1 : 0001238732025000 NPWP2 : 0001238732025000 NOP : ALAMAT : Jalan Medan Merdeka Barat no.6 Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2024 untuk 1 PNS MK.		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. #23 NTg5MDA4MjM=		KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pemhual Komitmen  ISI WIJAYANTI NIP 198312062009012002



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.026
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 30 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423710090

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.026	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	4.507.028	
	K	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		4.507.028

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja Tenaga Perbantuan POLRI a.n. Sadih bulan Januari - Desember 2024 sebesar Rp4.507.028,- (SPM 00086T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Januari 2025	Tanggal : 30 Januari 2025	Tanggal : 30 Januari 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN														
Nomor 00086T	Tanggal 27-Jan-2025	Halaman 1 dari 2												
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.883.178,00														
**** EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH ****														
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : Kekurangan Tunjangan Kinerja Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
653910.018.512411.07701WA.3367EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		4.883.178,00												
Jumlah Pengeluaran		4.883.178,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
		0,00												
Jumlah Potongan		0,00												
TOTAL PEMBAYARAN		4.883.178,00												
Kepada: <table><tr><td>Nomor : 906317</td><td>Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA</td></tr><tr><td>Nama Supplier : PARA AJUDAN HAKIM KONSTITUSI</td><td>Rekening : 124501003648507</td></tr><tr><td>NPWP1 : 0001238732025000</td><td>Nama Pemilik : SADIH</td></tr><tr><td>NPWP2 : 0001238732025000</td><td>Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Benupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2024 s.d Januari 2025 untuk 1 Tenaga Perbantuan MK</td></tr><tr><td>NOP :</td><td></td></tr><tr><td>ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6</td><td></td></tr></table>			Nomor : 906317	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA	Nama Supplier : PARA AJUDAN HAKIM KONSTITUSI	Rekening : 124501003648507	NPWP1 : 0001238732025000	Nama Pemilik : SADIH	NPWP2 : 0001238732025000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Benupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2024 s.d Januari 2025 untuk 1 Tenaga Perbantuan MK	NOP :		ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6	
Nomor : 906317	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA													
Nama Supplier : PARA AJUDAN HAKIM KONSTITUSI	Rekening : 124501003648507													
NPWP1 : 0001238732025000	Nama Pemilik : SADIH													
NPWP2 : 0001238732025000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Benupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2024 s.d Januari 2025 untuk 1 Tenaga Perbantuan MK													
NOP :														
ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6														
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. e23 NTg5MDA4MTM-		KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  ISTI WIDAYANTI NIP 198312062009012002												



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.027
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 6 Februari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423711980

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.027	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	1.517.000	
	K	511129	Beban Uang Makan PNS		1.517.000

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran kekurangan Uang Makan Bulan Oktober Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan MK sebesar Rp1.517.000,- (SPM 00103T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 6 Februari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 6 Februari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 6 Februari 2025
--	--	---



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN														
Nomor 00103T	Tanggal 27-Jan-2025	Halaman 1 dari 2												
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.441.150,00														
**** SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH ****														
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
653910.018.511129.07701WA.3367EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		1.517.000,00												
Jumlah Pengeluaran		1.517.000,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
561431.019.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		75.850,00												
Jumlah Potongan		75.850,00												
TOTAL PEMBAYARAN		1.441.150,00												
Kepada: <table><tr><td>Nomor : 1212027</td><td>Bank / Pos : Terlampir</td></tr><tr><td>Nama Supplier : TENAGA PERBANTUAN INSTANSI</td><td>Rekening : Terlampir</td></tr><tr><td>NPWP1 : 0001238732025000</td><td>Nama Pemilik : Terlampir</td></tr><tr><td>NPWP2 : 0001238732025000</td><td>Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Uang</td></tr><tr><td>NOP :</td><td>Makan Bulan Oktober Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan</td></tr><tr><td>ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6</td><td>MK,</td></tr></table>			Nomor : 1212027	Bank / Pos : Terlampir	Nama Supplier : TENAGA PERBANTUAN INSTANSI	Rekening : Terlampir	NPWP1 : 0001238732025000	Nama Pemilik : Terlampir	NPWP2 : 0001238732025000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Uang	NOP :	Makan Bulan Oktober Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan	ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6	MK,
Nomor : 1212027	Bank / Pos : Terlampir													
Nama Supplier : TENAGA PERBANTUAN INSTANSI	Rekening : Terlampir													
NPWP1 : 0001238732025000	Nama Pemilik : Terlampir													
NPWP2 : 0001238732025000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Uang													
NOP :	Makan Bulan Oktober Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan													
ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6	MK,													
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. c23 NTg5MDA4MTQ=		KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  ISTI WIDAYANTI NIP 198312062009012002												



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.028
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 6 Februari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423712730

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.028	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	1.258.000	
	K	511129	Beban Uang Makan PNS		1.258.000

Keterangan:

Jurnal balik atas kekurangan Uang Makan Bulan November Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan MK sebesar Rp1.258.000,- (SPM 00104T)

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 6 Februari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 6 Februari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 6 Februari 2025
--	--	---



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00104T	Tanggal 27-Jan-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.195.100,00		
**** SATU JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.511129.07701WA.3367EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		1.258.000,00
Jumlah Pengeluaran		1.258.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		62.900,00
Jumlah Potongan		62.900,00
TOTAL PEMBAYARAN		1.195.100,00
Kepada: Nomor : 1212027 Nama Supplier : TENAGA PERBANTUAN INSTANSI NPWP1 : 0001238732025000 NPWP2 : 0001238732025000 NOP : ALAMAT : Jl.Medan Merdeka Barat No.6 Bank / Pos : Terlampir Rekening : Terlampir Nama Pemilik : Terlampir Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Uang Makan Bulan November Tahun 2024 untuk 2 Perbantuan MK.		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. e23 NTg5MDA4MTg-		KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Januari 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  ISTI WIDAYANTI NIP 198312062009012002



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.029
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 14 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423713652

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.029	D	524111	Beban Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Biasa	22.148.447	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		22.148.447

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran pengembalian belanja perjalanan dinas yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 dengan sumber dokumen yang diterbitkan pada TA 2025

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 14 Januari 2025	Tanggal : 14 Januari 2025	Tanggal : 14 Januari 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.030
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 14 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423714203

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.030	D	523121	Beban Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.735.224	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		7.735.224

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran pengembalian belanja BBM bulan Desember 2024 bagi pejabat Eselon II sebanyak 12 orang sesuai SPBy 4622 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 14 Januari 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 14 Januari 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 14 Januari 2025
--	--	---



MAHKAMAH KONSTITUSI RI

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11 Desember 2024 **Nomor :** 04622/PB/653910/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 24.000.000,00

Dua Puluh Empat Juta Rupiah

Kepada : Daryono

Untuk Pembayaran : Biaya BBM bulan Desember 2024 bagi pejabat eselon 2 sebanyak 12 Orang sebagaimana terlampir

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 077.01.WA.3369.EBA.523121

Kode : 077.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA JAKARTA PUSAT , 11 Desember 2024

-

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

IRVAN AFRIALDI

.....



BUDI WJAYANTO

NIP 197804042006041005

.....

NIP 198104082006041007

Dicetak pada tanggal 11 Desember 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JP.031
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 14 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-423720607

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.031	D	521213	Beban Barang dan Jasa - Beban Honor Output Kegiatan	9.295.508	
	K	114311	Pendapatan yang masih harus diterima		9.295.508

Keterangan:

Jurnal balik atas pembayaran pengembalian belanja Honor Perbantuan Instansi dalam rangka PHPUKada Bulan Desember 2024 sesuai Spby 4664 dan 4659 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 14 Januari 2025	Tanggal : 14 Januari 2025	Tanggal : 14 Januari 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 12 Desember 2024 Nomor : 04664/PB/653910/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 9.200.000,00

Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Thessa Fauziah Pambudi dkk

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa honor Tenaga statistisi dalam rangka Kegiatan Penanganan Perkara PHPUKada untuk Bulan Desember Tahun 2024 berdasarkan SK Nomor 471.1 Tahun 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 077.01.BJ.3372.QCE.521213

Kode : 077.01.BJ

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA JAKARTA PUSAT , 12 Desember 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

ANDI APRILLA MEGANANDA

.....

FAJAR LAKSONO

NIP 197704242006042003

.....

NIP 197912262008011008

Dicetak pada tanggal 12 Desember 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI RI

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 12 Desember 2024 **Nomor :** 04659/PB/653910/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 39.530.400,00

Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah

Kepada : Sarwoko dkk

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa honor Tenaga Perbantuan Pemadam Kebakaran dalam rangka Kegiatan Penanganan Perkara PHPUKada untuk Bulan Desember Tahun 2024 berdasarkan SK Nomor 471.1 Tahun 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 077.01.BJ.3372.QCE.521213

Kode : 077.01.BJ

Setuju/lunas dibayar, tanggal

-

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ANDI APRILLA MEGANANDA

NIP 197704242006042003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

KOTA JAKARTA PUSAT , 12 Desember 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

FAJAR LAKSONO

NIP 197912262008011008

Dicetak pada tanggal 12 Desember 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.018
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☒	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.018	D	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	57.144.167	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		57.144.167

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang BRI oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Mei 2025 sebesar Rp57.144.167,- (685.730.000-(55/60*685.730.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025 
--	--	---



Ditandatangani secara elektronik
 Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature
 mk-1243939916250725065830

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Sewa Ruang BRI selama 60 bulan (1 Juni 2025- 31 Mei 2030)

Tarif Sewa 60 Bulan **724.504.000**

Tarif Sewa Per Bulan 12.075.067

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	84.525.467
Tahun 2026	144.900.800
Tahun 2027	144.900.800
Tahun 2028	144.900.800
Tahun 2029	144.900.800
Tahun 2030	60.375.333
Berakhir 31 Mei 2030	724.504.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.019
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.019	D	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	937.291.500	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		937.291.500

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Gedung Serba guna Bekasi oleh Koperasi untuk Periode Januari s.d. Desember 2025 sebesar Rp937.291.500,- (1.874.583.000-(12/24*1.874.583.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



Sewa Gedung Serbaguna selama 24 bulan (1 Januari 2024 - 31 Desember 2025)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan)

1.874.583.000

Tarif Sewa Per Bulan

78.107.625

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2024	937.291.500
Tahun 2025	937.291.500
Berakhir 31 Desember 2025	1.874.583.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.020
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.020	D	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	65.545.000	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		65.545.000

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang Koperasi (Tambahan Basement I) oleh Koperasi Konstitusi untuk Periode Januari s.d. Oktober 2025 sebesar Rp65.545.000,- (157.308.000-(14/24*157.308.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Sewa Ruang Koperasi Konstitusi (Basement I - Toserba & Kantin) selama 2 Tahun
(1 Januari 2025 - 31 Desember 2026)**

Tarif Sewa 2 Tahun/24 Bulan **279.875.000**
Tarif Sewa Per Bulan 11.661.458

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	139.937.500
Tahun 2026	139.937.500
Berakhir 31 Desember 2026	279.875.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.021
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.021	D	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	16.423.917	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		16.423.917

Keterangan:

Jurnal balik atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI untuk Periode Januari s.d. November 2025 sebesar Rp16.423.917,- (17.917.000-(1/12*17.917.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025	Tanggal : 1 Januari 2025



**Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI Kantor
Cabang Bekasi selama 12 bulan (Desember 2024 - November 2025)
19 November 2024 s.d. 18 November 2025**

Tarif Sewa 12 Bulan **17.917.000**
Tarif Sewa Per Bulan 1.493.083

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Desember	1.493.084
Januari	1.493.084
Februari	1.493.084
Maret	1.493.084
April	1.493.083
Mei	1.493.083
Juni	1.493.083
Juli	1.493.083
Agustus	1.493.083
September	1.493.083
Oktober	1.493.083
November	1.493.083
Berakhir November 2024	17.917.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.035
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440294048

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.035	D	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka	712.428.933	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		712.428.933

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang BRI oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk Periode 1 Juli 2025 s.d. 31 Mei 2030 sebesar Rp712.428.933,- (724.504.000-(1/60*724.504.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



Sewa Ruang BRI selama 60 bulan (1 Juni 2025- 31 Mei 2030)

Tarif Sewa 60 Bulan **724.504.000**

Tarif Sewa Per Bulan 12.075.067

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	84.525.467
Tahun 2026	144.900.800
Tahun 2027	144.900.800
Tahun 2028	144.900.800
Tahun 2029	144.900.800
Tahun 2030	60.375.333
Berakhir 31 Mei 2030	724.504.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.036
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440294317

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.036	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	468.645.750	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		468.645.750

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Gedung Serba guna Bekasi oleh Koperasi untuk Periode Juli s.d. Desember 2025 sebesar Rp468.645.750,- (1.874.583.000-(18/24*1.874.583.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



Sewa Gedung Serbaguna selama 24 bulan (1 Januari 2024 - 31 Desember 2025)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan) **1.874.583.000**

Tarif Sewa Per Bulan 78.107.625

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2024	937.291.500
Tahun 2025	937.291.500
Berakhir 31 Desember 2025	1.874.583.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.037
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440294566

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.037	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	26.218.000	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		26.218.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang Koperasi (Tambahan Basement I) oleh Koperasi Konstitusi untuk Periode Juli s.d. Oktober 2025 sebesar Rp26.218.000,- (157.308.000-(20/24*157.308.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Sewa Ruang Koperasi Konstitusi (Basement I - Toserba & Kantin) selama 2 Tahun
(1 Januari 2025 - 31 Desember 2026)**

Tarif Sewa 2 Tahun/24 Bulan **279.875.000**

Tarif Sewa Per Bulan 11.661.458

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	139.937.500
Tahun 2026	139.937.500
Berakhir 31 Desember 2026	279.875.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.038
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440294885

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.038	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7.465.417	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		7.465.417

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI untuk Periode Juli s.d. November 2025 sebesar Rp7.465.417,- (17.917.000-(7/12*17.917.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI Kantor Cabang
Bekasi selama 12 bulan (Desember 2024 - November 2025)
19 November 2024 s.d. 18 November 2025**

Tarif Sewa 12 Bulan **17.917.000**
Tarif Sewa Per Bulan 1.493.083

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Desember	1.493.084
Januari	1.493.084
Februari	1.493.084
Maret	1.493.084
April	1.493.083
Mei	1.493.083
Juni	1.493.083
Juli	1.493.083
Agustus	1.493.083
September	1.493.083
Oktober	1.493.083
November	1.493.083
Berakhir November 2024	17.917.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.039
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440296893

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.039	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	209.906.250	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		209.906.250

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Kantin dan Toserba oleh Koperasi Konstitusi untuk periode Juli 2025 s.d. Desember 2026 sebesar Rp209.906.250,- (279.875.000-(6/24*279.875.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



**Sewa Tambahan Ruang Koperasi Konstitusi (Basement I) selama 2 tahun (13 Oktober 2023 sd 15 Oktober 2025)
November 2023 - Oktober 2025**

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan) **157.308.000**

Tarif Sewa Per Bulan 6.554.500

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2023 (November - Desember)	13.109.000
Tahun 2024 (Januari - Desember)	78.654.000
Tahun 2025 (Januari - Oktober)	65.545.000
Berakhir 9 Juli 2025	157.308.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.040
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 Juni 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-440303522

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.040	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	36.064.000	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		36.064.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima di muka Sewa Lapangan Tennis Bekasi oleh Koperasi Konstitutusi untuk periode 1 Juli 2025 sd 31 Mei 2027 sebesar Rp36.064.000,- (37.632.000-(1/24*37.632.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025	Tanggal : 30 Juni 2025



Sewa Lapangan Tennis Bekasi oleh Koperasi Konstitusi selama 2 tahun (1 Juni 2025 s.d. 31 Mei 2027)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan) **37.632.000**

Tarif Sewa Per Bulan 1.568.000

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025 (Juni - Desember)	10.976.000
Tahun 2026 (Januari - Desember)	18.816.000
Tahun 2027 (Januari - Mei)	7.840.000
Berakhir 31 Mei 2027	37.632.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JU.003
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
√	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.003	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.119.389.058	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		10.119.389.058

Keterangan:

Jurnal penyesuaian untuk menjurnal balik akun utang yang belum diterima tagihannya yang merupakan nilai RPATA yang BASTnya tanggal sd 31 Desember 2024 dan sudah selesai di Januari 2025

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 1 Januari 2025 	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Januari 2025 	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 1 Januari 2025 
--	--	---



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1785573286250725065944

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

MEMO PENYESUAIAN TRIWULAN III TA 2025



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.076
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.076	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	11.530.310	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		11.530.310

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa manfaat Lisense GeoTrust TrueBusinessID Wildcard periode Oktober 2025 s.d. Agustus 2026 sebesar Rp11.530.310,- (12.578.520-(1/12*12.578.520))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 30 September 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 30 September 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 30 September 2025
--	--	---



Digital Signature
 mk1677486432251022014001

Masa manfaat Lisensi GeoTrust TrueBusinessID Wildcard (Pemeliharaan ICT)
(02 September 2025 - 05 September 2026)
mkri.id

Rp12.578.520

Rp 1.048.210

2025

BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
SEPTEMBER	Rp1.048.210
OKTOBER	Rp1.048.210
NOVEMBER	Rp1.048.210
DESEMBER	Rp1.048.210
2026 JANUARI	Rp1.048.210
FEBRUARI	Rp1.048.210
MARET	Rp1.048.210
APRIL	Rp1.048.210
MEI	Rp1.048.210
JUNI	Rp1.048.210
JULI	Rp1.048.210
AGUSTUS	Rp1.048.210
JUMLAH	Rp12.578.520

11.530.310



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.060
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.060	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	1.680.767	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		1.680.767

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan aplikasi Grammarly Premium periode Oktober 2025 s.d. April 2026 sebesar Rp1.680.767,- (2.881.314-(5/12*2.881.314))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Masa Langganan Aplikasi Grammarly Premium
(14 Mei 2025 s.d. 14 Mei 2026)

Rp2.881.314

Rp 240.110

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	MEI	240.110	521219
	JUNI	240.110	
	JULI	240.110	
	AGUSTUS	240.110	
	SEPTEMBER	240.110	
	OKTOBER	240.110	
	NOVEMBER	240.109	
2026	DESEMBER	240.109	1.680.767
	JANUARI	240.109	
	FEBRUARI	240.109	
	MARET	240.109	
	APRIL	240.109	
	JUMLAH	Rp2.881.314	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.077
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.077	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	1.652.211	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.652.211

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa manfaat Lisense Apple Developer Program periode Oktober 2025 s.d. September 2026 sebesar Rp1.652.211,- $(1.652.211 - (11/12 * 1.652.211))$

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Masa manfaat Lisensi Apple Developer Program
(7 Oktober 2025 s.d. 6 Oktober 2026)**

1.652.211

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
2025	OKTOBER	137.684
	NOVEMBER	137.684
	DESEMBER	137.684
2026	JANUARI	137.684
	FEBRUARI	137.684
	MARET	137.684
	APRIL	137.684
	MEI	137.684
	JUNI	137.684
	JULI	137.684
	AGUSTUS	137.684
	SEPTEMBER	137.684
	JUMLAH	Rp1.652.211

Rp 1.652.211



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.061
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.061	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	755.871	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		755.871

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Freepik periode Oktober 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp755.871,-
 (2.267.614-(8/12*2.267.614))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan Freepik Mahkamah Konstitusi TA 2024 **Rp 2.267.614**
(Februari 2025 s.d. Januar 2026)

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	188.968	521219
	MARET	188.968	
	APRIL	188.968	
	MEI	188.968	
	JUNI	188.968	
	JULI	188.968	
	AGUSTUS	188.968	755.870
	SEPTEMBER	188.968	
	OKTOBER	188.968	
2026	NOVEMBER	188.968	
	DESEMBER	188.967	
	JANUARI	188.967	
	JUMLAH	Rp2.267.614	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.082
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.082	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	3.504.285	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		3.504.285

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Akun Envanto periode Oktober 2025 s.d. Juli 2026 sebesar 3.504.285,-
 (4.205.142-(2/12*4.205.142))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Langganan Akun Envanto Mahkamah Konstitusi TA 2025
(Agustus 2025 - Juli 2026)**

Rp 4.205.142

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	AGUSTUS	350.429	
	SEPTEMBER	350.429	521219
	OKTOBER	350.429	
	NOVEMBER	350.429	
	DESEMBER	350.429	3.504.285
2026	JANUARI	350.429	
	FEBRUARI	350.429	
	MARET	350.429	
	APRIL	350.429	
	MEI	350.429	
	JUNI	350.429	
	JULI	350.429	
	JUMLAH	Rp4.205.142	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.062
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.062	D	522141	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	15.125.000	
	K	522141	Beban Sewa		15.125.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Oktober 2025 sebesar Rp15.125.000,- $(181.500.000 - (11/12 * 181.500.000))$

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach **Rp 181.500.000**
(November 2024 - Oktober 2025)

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	NOVEMBER	15.125.000	
	DESEMBER	15.125.000	
2025	JANUARI	15.125.000	15.125.000
	FEBRUARI	15.125.000	
	MARET	15.125.000	
	APRIL	15.125.000	
	MEI	15.125.000	
	JUNI	15.125.000	
	JULI	15.125.000	
	AGUSTUS	15.125.000	
	SEPTEMBER	15.125.000	
	OKTOBER	15.125.000	
	JUMLAH	Rp181.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.063
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.063	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	7.640.000	
	K	522141	Beban Sewa		7.640.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa tambahan langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach periode Oktober s.d. November 2025 sebesar Rp7.640.000,- (42.020.000-(9/11*42.020.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 Sptember 2025	Tanggal : 30 Sptember 2025	Tanggal : 30 Sptember 2025



**Langganan lisensi Adobe Genuine Business Outreach
(Januari - November 2025)**

Rp 42.020.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	JANUARI	3.820.000	
	FEBRUARI	3.820.000	
	MARET	3.820.000	
	APRIL	3.820.000	
	MEI	3.820.000	
	JUNI	3.820.000	
	JULI	3.820.000	
	AGUSTUS	3.820.000	
	SEPTEMBER	3.820.000	
	OKTOBER	3.820.000	7.640.000
	NOVEMBER	3.820.000	
	JUMLAH	Rp42.020.000	42.020.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.064
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.064	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	33.166.667	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		33.166.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Lisensi A-Flex 3 periode Oktober 2025 s.d. Januari 2026 sebesar
 Rp33.166.667,- (99.500.000-(8/12*99.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 30 September 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 30 September 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 30 September 2025
--	--	---



**Langganan Lisensi A-Flex 3 TA 2025
(19 Januari 2025 – 18 Januari 2026)**

Rp 99.500.000

Rp 99.500.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	8.291.667	
	MARET	8.291.667	521219
	APRIL	8.291.667	
	MEI	8.291.667	
	JUNI	8.291.667	58.041.667
	JULI	8.291.667	
	AGUSTUS	8.291.667	
	SEPTEMBER	8.291.667	
	OKTOBER	8.291.666	
	NOVEMBER	8.291.666	
	DESEMBER	8.291.666	
	JANUARI	8.291.666	33.166.664
	JUMLAH	Rp99.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.078
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.078	D	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	76.048.875	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		76.048.875

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub periode Oktober 2025 s.d. Juli 2026 sebesar Rp76.048.875,- (91.258.650-(2/12*91.258.650))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan Lisensi CSEmail-Sec-Sub TA 2025 **Rp 91.258.650**
(08 Agustus 2025 – 07 Agustus 2026)

Rp 91.258.650

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	AGUSTUS	7.604.888	523121
	SEPTEMBER	7.604.888	
	OKTOBER	7.604.888	
	NOVEMBER	7.604.888	
	DESEMBER	7.604.888	
2026	JANUARI	7.604.888	76.048.875
	FEBRUARI	7.604.888	
	MARET	7.604.888	
	APRIL	7.604.888	
	MEI	7.604.888	
	JUNI	7.604.888	
	JULI	7.604.888	
	JUMLAH	Rp91.258.650	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.065
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.065	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	5.166.667	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		5.166.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Tableau Creator periode Oktober 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp5.166.667,- (15.500.000-(8/12*15.500.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Langganan Lisensi Tableau Creator
(Januari 2025 s.d. Januari 2026)**

Rp 15.500.000

Rp 15.500.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	1.291.667	
	MARET	1.291.667	521219
	APRIL	1.291.667	
	MEI	1.291.667	
	JUNI	1.291.667	1.291.667
	JULI	1.291.667	
	AGUSTUS	1.291.667	
	SEPTEMBER	1.291.667	
	OKTOBER	1.291.666	5.166.664
	NOVEMBER	1.291.666	
	DESEMBER	1.291.666	
2026	JANUARI	1.291.666	
	JUMLAH	Rp15.500.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.066
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.066	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	6.126.667	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		6.126.667

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Qontak (WA Blast) periode Oktober 2025 s.d. Januari 2026 sebesar Rp6.126.667,- (18.380.000-(8/12*18.380.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan Lisensi Qontak (WA Blast)
(Januari 2025 s.d. Januari 2026)

Rp 18.380.000

Rp 18.380.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	FEBRUARI	1.531.667	
	MARET	1.531.667	521219
	APRIL	1.531.667	
	MEI	1.531.667	
	JUNI	1.531.667	1.531.667
	JULI	1.531.667	
	AGUSTUS	1.531.667	
	SEPTEMBER	1.531.667	
	OKTOBER	1.531.666	6.126.664
	NOVEMBER	1.531.666	
	DESEMBER	1.531.666	
2026	JANUARI	1.531.666	
	JUMLAH	Rp18.380.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.067
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.067	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	29.440.142	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		29.440.142

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Zoom periode Oktober 2025 s.d. April 2026 sebesar Rp29.440.142,- (50.468.814-(5/12*50.468.814))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan Lisensi Zoom
(April 2025 s.d. April 2026
)

Rp 50.468.814

Rp 50.468.814

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	MEI	4.205.735	
	JUNI	4.205.735	521219
	JULI	4.205.735	
	AGUSTUS	4.205.735	
	SEPTEMBER	4.205.735	
	OKTOBER	4.205.735	29.440.139
	NOVEMBER	4.205.734	
2026	DESEMBER	4.205.734	
	JANUARI	4.205.734	
	FEBRUARI	4.205.734	
	MARET	4.205.734	
	APRIL	4.205.734	
	JUMLAH	Rp50.468.814	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.074
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.074	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	3.000.000	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		3.000.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Sertifikasi Keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode Januari s.d. Desember 2026 sebesar Rp3.000.000,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Sertifikasi Keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Januari s.d. Desember 2026

Rp 3.000.000

Rp 3.000.000

2026

BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
JANUARI	250.000
FEBRUARI	250.000
MARET	250.000
APRIL	250.000
MEI	250.000
JUNI	250.000
JULI	250.000
AGUSTUS	250.000
SEPTEMBER	250.000
OKTOBER	250.000
NOVEMBER	250.000
DESEMBER	250.000
JUMLAH	Rp3.000.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.075
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.075	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	9.900.000	
	K	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		9.900.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Membership Institute of Internal Auditors (IIA) periode Januari s.d. Desember 2026 sebesar Rp9.900.000,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Renewal Membership Institute of Internal Auditors (IIA) Rp 9.900.000
Januari s.d. Desember 2026

Rp 9.900.000

2026	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN
	JANUARI	825.000
	FEBRUARI	825.000
	MARET	825.000
	APRIL	825.000
	MEI	825.000
	JUNI	825.000
	JULI	825.000
	AGUSTUS	825.000
	SEPTEMBER	825.000
	OKTOBER	825.000
	NOVEMBER	825.000
	DESEMBER	825.000
	JUMLAH	Rp9.900.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.079
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.079	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	201.873.480	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		201.873.480

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Membership Institute of Internal Auditors (IIA) periode Januari s.d. Desember 2026 sebesar Rp9.900.000,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Langganan Lisensi Global Protect
12 Oktober 2025 s.d. 11 Oktober 2026**

Rp 201.873.480

Rp 201.873.480

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	OKTOBER	16.822.790	
	NOVEMBER	16.822.790	523121
	DESEMBER	16.822.790	
2026	JANUARI	16.822.790	
	FEBRUARI	16.822.790	16.822.790
	MARET	16.822.790	201.873.480
	APRIL	16.822.790	
	MEI	16.822.790	
	JUNI	16.822.790	
	JULI	16.822.790	
	AGUSTUS	16.822.790	
	SEPTEMBER	16.822.790	
	JUMLAH	Rp201.873.480	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.083
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.079	D	114112	Belanja Barang Di bayar Dimuka (Prepaid)	124.000.000	
	K	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		124.000.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa masa langganan Langganan Lisensi Antivirus Bitdefender Gravityzone Business Security Premium periode Oktober 2025 s.d. Mei 2026 sebesar Rp124.000.000,- (186.000.000-(4/12*186.000.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Langganan Lisensi Antivirus Bitdefender Gravityzone Business Security Premium **Rp 186.000.000**
Juni 2025 s.d. Mei 2026

Rp 186.000.000

	BULAN	BIAYA SEWA PER BULAN	
2025	JUNI	15.500.000	
	JULI	15.500.000	523121
	AGUSTUS	15.500.000	
	SEPTEMBER	15.500.000	
	OKTOBER	15.500.000	15.500.000
	NOVEMBER	15.500.000	124.000.000
	DESEMBER	15.500.000	
2026	JANUARI	15.500.000	
	FEBRUARI	15.500.000	
	MARET	15.500.000	
	APRIL	15.500.000	
	MEI	15.500.000	
	JUMLAH	Rp186.000.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JU.039
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-476067412, GLP-653910-476071216

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.039	D	115212	Piutang Lainnya	21.653.112	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		21.653.112
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	108.266	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		108.266

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja modal TA 2024 PT. Anggi Gian Putra sebesar Rp21.653.112,00 karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan Konstruksi Penataan Ruang Kerja Gedung III Mahkamah Konstitusi berupa Masjid TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp108.266,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 30 September 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 30 September 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 30 September 2025
--	--	---



Digital Signature
mk-298644848251022014312

**Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Penataan Ruang Kerja Gedung 3
Mahkamah Konstitusi Berupa Masjid**

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
A.	Pekerjaan Partisi dan Dinding						
2	Pemasangan partisi 2 Muka; Gypsum Jayaboard 12mm; rangka metal stud Jayaboard 76mm PN188 0,35mm dan U Runner Jayaboard 76mm PN182 0,35mm; Corner bead Jayaboard PN300 Rockwool density 80	m2	453.400,00	89,34	87,40	1,94	879.596,00
3	Pemasangan partisi krawangan, Panel MDF Laser Cutting (HMR/MDF Hijau tebal 12; Motif dan warna sesuai dengan request owner/MK; Finishing cat duco)	m2	1.828.600,00	39,96	39,60	0,36	658.296,00
14	Pemasangan granit dinding area ruang wudhu; Granit Roman Granito	m2	565.000,00	40,80	39,73	1,07	604.550,00
20	Pemasangan Dinding Marmer untuk Area Lobby; Marmer Light Emperador	m2	959.400,00	12,00	11,34	0,66	633.204,00
B.	Pekerjaan Plafond						
1	Pemasangan plafond gipsum; rangka besi hollow 40x40mm modul 60x60cm; papan gipsum Jayaboard tebal 9mm	m2	366.100,00	550,55	516,24	34,31	12.560.891,00
3	Pemasangan ornamen plafond; ornamen papan PVC laser cutting; plastik mika warna putih susu	m2	411.500,00	37,79	35,16	2,63	1.082.245,00
C.	Pekerjaan Lantai						
1	Pemasangan pelapis lantai SPC; SPC Wooden pattern Taco	m2	423.500,00	33,70	25,20	8,50	3.599.750,00
3	Pasang lantai Homogenous Tile sesuai warna existing pada area ex lantai karpet ex lantai parket	m2	403.600,00	40,00	35,95	4,05	1.634.580,00
Total							21.653.112,00

P. H.
Pr.
h.



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.040
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-478888282, GLP-653910-478894117

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.040	D	115212	Piutang Lainnya	8.579.730	
	K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		8.579.730
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	42.899	
	K	116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		42.899

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja barang TA 2024 CV. Tirta Arjuno Lestari sebesar Rp8.579.729,77 karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan Pemeliharaan Area Drop Off Gedung II MK TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp42.899,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN 10

Lampiran 10

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Berupa Pemeliharaan Area *Drop Off* Gedung 2 MK

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
1	Pembongkaran ACP eksisting dan pemasangan baru	m2	945.945,95	142,00	132,93	9,07	8.579.729,77
Total							8.579.729,77

[Handwritten signature]



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JU.041
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-476077535, GLP-653910-476082428

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.041	D	115212	Piutang Lainnya	3.027.973	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3.027.973
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	15.140	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		15.140

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja modal TA 2024 PT. Lebah Rajin Sejahtera sebesar Rp3.027.972,83 karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan Konstruksi Penggantian Kanopi Rumah Dinas MK TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp15.140,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN 11

Lampiran 11

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Penggantian Kanopi Rumah Dinas MK di Kota Bekasi

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
1	Pekerjaan Pengecatan Rangka Kanopi; cat besi ftalit glossy warna hitam	m2	94.594,59	953,81	921,80	32,01	3.027.972,83
Total							3.027.972,83

[Handwritten signature]



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.042
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-476087958, GLP-653910-476089736

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☒	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.042	D	115212	Piutang Lainnya	81.833.578	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		81.833.578
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	409.168	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		409.168

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja modal TA 2024 CV. Tirta Arjuno Lestari sebesar Rp81.833.578,27 karena adanya kekurangan volume atas pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung III MK TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp409.168,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN 12

Lampiran 12

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung III MK

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN						
1	- bongkaran Dinding Batas, partisi, kaca+ buang puing ex. Bongkaran	m2	40.270,27	905,48	851,99	53,49	2.154.056,74
3	- Plafon Gybsum /acustic + Rangka, dropceiling/upceiling, + buang puing ex. Bongkaran	m2	38.108,11	1.308,85	1.261,84	47,01	1.791.462,25
	PEKERJAAN DINDING						
1	Pemasangan Dinding Bata Ringan						
	- Pekerjaan Dinding Bata Ringan dengan perekat semen instan MU 380 Ex. MORTAL UTAMA	m2	189.369,37	134,52	107,34	27,18	5.147.059,48
	- Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dengan semen instan MU-301 Ex. Mortal Utama	m2	65.315,32	269,04	182,49	86,55	5.653.040,95
	- Pekerjaan Acian dinding bata ringan dengan semen instan MU-200 Ex. Mortal Utama	m2	82.162,16	269,04	14,76	254,28	20.892.194,04
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
	Pekerjaan Pengkabelan						
1	Pek. Kabel Daya perenerangan lantai 6 NYM 3 x 2,5mm ex. Supreme Lengkap Conduit 20mm (Kabel daya utama)	m	60.000,00	174,71	-	174,71	10.482.600,00
2	Pek. Kabel Daya Stop Kontak Lantai 6 NYM 3 x 2,5mm ex. Supreme (Lengkap Conduit 20mm) terdapat 3 kabel dari panel	m	60.000,00	431,34	125,95	305,39	18.323.400,00
	Pekerjaan Instalasi Fire Alarm						
5	Photoelectric Smoke Detector Ex Notifire	buah	855.810,81	39,00	36,00	3,00	2.567.432,43
	PEKERJAAN AC DAN PERALATAN PENDUKUNG TERPASANG						
3	Instalasi Ducting dari bahan PIR (Polyisocyanurate) tebal 20mm termasuk aksesoris Ex. Firstduct						
	- Ducting lurus : 1000 x 250	m'	933.423,42	35,69	20,20	15,49	14.458.728,78
4	Difusser uk. 380 x 380mm Ex. Primawangi	m2	363.603,60	65,00	64,00	1,00	363.603,60
Total							81.833.578,27



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.043
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-478897801, GLP-653910-478899085

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☒	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.043	D	115212	Piutang Lainnya	12.100.651	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		12.100.651
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	60.503	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		60.503

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja modal TA 2024 CV. Tiga Putra Abikarya sebesar Rp12.100.651,03 karena adanya kekurangan volume atas pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Gedung Grha Konstitusi 1, 4, dan 5 Pusdik MK TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp60.503,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN 13

Lampiran 13

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Gedung Grha Konstitusi 1,4, dan 5 Puskid Pancasila dan Konstitusi MK

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
1	Pembongkaran Lantai Kamar Mandi	m2	38.378,38	378,00	360,83	17,17	658.956,78
2	Pemasangan Lantai Kamar Mandi	m2	471.351,35	378,00	360,83	17,17	8.093.102,68
3	Pengecatan Tembok Lama	m2	33.243,24	624,00	523,27	100,73	3.348.591,57
Total							12.100.651,03




MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.044
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-478901738, GLP-653910-478901738

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.043	D	115212	Piutang Lainnya	14.639.423	
	K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		14.639.423
	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	73.197	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		73.197

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas pencatatan piutang belanja barang TA 2024 CV. Tiga Putra Abikarya sebesar Rp14.639.423,48 karena adanya kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Toilet GK 7, Ruang Management Bulding GK 2, Gudang GK 2, dan Tempat Sampah Gedung Pusdik TA 2024 sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 dan penyisihan piutang sebesar 5 permil senilai Rp73.197,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN 14

Lampiran 1

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Toilet GK 7, Ruang *Management Building* GK 2, Gudang GK 2, dan Tempat Sampah Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
1	Pemasangan Dinding Kamar Mandi	m2	430.630,63	81,00	68,08	12,92	5.563.747,74
2	Pemasangan Washtafel	Unit	2.941.441,44	6,00	5,00	1,00	2.941.441,44
3	Pemasangan Instalasi Exhaust-fan	Titik	526.126,13	14,00	4,00	10,00	5.261.261,30
4	Pembongkaran Keramik Dinding	m2	67.567,57	81,00	68,08	12,92	872.973,00
Total							14.639.423,48

[Handwritten signature]



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
No. Dokumen Modul GLP : JU.045
Dokumen Pendukung :
Tanggal : 30 September 2025
Tahun Anggaran : Tahun 2025
Keterangan : GLP-653910-480977180

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.045	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	446.500.000	
	K	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		446.500.000

Keterangan:

Koreksi pencatatan atas Pengadaan Artificial Intelligence (AI) Platform 2025 dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI RI MAHKAMAH KONSTITUSI RI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00673T	Tanggal 26-Sep-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 394.207.207,00		
**** TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-077.01.1.653910/2025 Tanggal :29-Nov-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/018.25003204/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 23-06-2025 Nomor Kontrak/SPK : 88.4/PBJ/MK/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
653910.018.536111.07701BJ.7069RAQ.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		446.500.000,00
Jumlah Pengeluaran		446.500.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		8.045.045,00
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		44.247.748,00
Jumlah Potongan		52.292.793,00
TOTAL PEMBAYARAN		394.207.207,00
Kepada: Nomor : 391 Nama Supplier : PT. INDONESIA COMNETS PLUS NPWP1 : 0010611903051000 NPWP2 : 0001238732025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin I Sesuai BAPP Nomor 88.6/PBJ/MK/2025 Tanggal 15 September 2025 dan BAP Nomor 88.7/PBJ/MK/2025 Tanggal 16 September 2025 Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1260004776901 Nama Pemilik : INDONESIA COMNETS PL Alamat : Gedung Wisma Mulia It.50 & 51 Jl. Gatot Subroto no.42, Kuningan Barat		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		KOTA JAKARTA PUSAT, 26 September 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  Nanang Subekti NIP 197411182006041002
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 Nzk5NzU1MDc=		



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JU.046
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : GLP-653910-480978242

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	√	Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JU.046	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	14.639.423	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		14.639.423

Keterangan:

Koreksi atas kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Toilet GK 7, Ruang Management Bulding GK 2, Gudang GK 2, dan Tempat Sampah Gedung Pusdik TA 2024 oleh CV. Tiga Putra Abikarya sesuai LHP BPK Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025

Dibuat oleh : Allita Prisantama NIP : 199501292018012001 Tanggal : 30 September 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 30 September 2025	Direkam oleh : Afrianto Amri NIP : 198404152018011001 Tanggal : 30 September 2025
--	--	---



LAMPIRAN 14

Lampiran 14

Perincian Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Toilet GK 7, Ruang *Management Building* GK 2, Gudang GK 2, dan Tempat Sampah Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Harga Satuan	Volume			Nilai Kekurangan Volume
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 7)
1	Pemasangan Dinding Kamar Mandi	m2	430.630,63	81,00	68,08	12,92	5.563.747,74
2	Pemasangan Washtafel	Unit	2.941.441,44	6,00	5,00	1,00	2.941.441,44
3	Pemasangan Instalasi Exhaust-fan	Titik	526.126,13	14,00	4,00	10,00	5.261.261,30
4	Pembongkaran Keramik Dinding	m2	67.567,57	81,00	68,08	12,92	872.973,00
Total							14.639.423,48

[Handwritten signature]



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.068
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.068	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	676.203.733	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		676.203.733

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang BRI oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk Periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Mei 2030 sebesar Rp676.203.733,- (724.504.000-(4/60*724.504.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Digital Signature
 mk93111552251022014903

Sewa Ruang BRI selama 60 bulan (1 Juni 2025- 31 Mei 2030)

Tarif Sewa 60 Bulan **724.504.000**

Tarif Sewa Per Bulan 12.075.067

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	84.525.467
Tahun 2026	144.900.800
Tahun 2027	144.900.800
Tahun 2028	144.900.800
Tahun 2029	144.900.800
Tahun 2030	60.375.333
Berakhir 31 Mei 2030	724.504.000

676.203.733



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.069
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

√	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.069	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	234.322.875	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		234.322.875

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Gedung Serba guna Bekasi oleh Koperasi untuk Periode Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp234.322.875,- (1.874.583.000-(21/24*1.874.583.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Sewa Gedung Serbaguna selama 24 bulan (1 Januari 2024 - 31 Desember 2025)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan)

1.874.583.000

Tarif Sewa Per Bulan

78.107.625

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN	
Tahun 2024	937.291.500	
Tahun 2025	937.291.500	234.322.875
Berakhir 31 Desember 2025	1.874.583.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.070
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

√	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.070	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6.554.500	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		6.554.500

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka sewa Ruang Koperasi (Tambahan Basement I) oleh Koperasi Konstitusi untuk Periode Oktober 2025 sebesar Rp6.554.500,- (157.308.000-(23/24*157.308.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Sewa Tambahan Ruang Koperasi Konstitusi (Basement I) selama 2 tahun (13 Oktober 2023 sd 15 Oktober 2025)
November 2023 - Oktober 2025**

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan) **157.308.000**
Tarif Sewa Per Bulan 6.554.500

	Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
2	Tahun 2023 (November - Desember)	13.109.000
12	Tahun 2024 (Januari - Desember)	78.654.000
10	Tahun 2025 (Januari - Oktober)	65.545.000
	Berakhir 9 Juli 2025	157.308.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.071
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

☒	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Transfer Masuk
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Transfer Keluar
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Penghapusan Piutang	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Penyusutan Aset	☐	Uang Muka Belanja
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Perolehan Aset
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Persediaan	☐	Hibah Langsung
☐	Koreksi Antar Beban	☐	
☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Penyesuaian Neraca
☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	☐	Jurnal Koreksi
☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	☐	Jurnal Umum
☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.071	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.986.167	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		2.986.167

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI untuk Periode Oktober s.d. November 2025 sebesar Rp2.986.167,- (17.917.000-(10/12*17.917.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI Kantor Cabang Bekasi
selama 12 bulan (Desember 2024 - November 2025)
19 November 2024 s.d. 18 November 2025**

Tarif Sewa 12 Bulan **17.917.000**
 Tarif Sewa Per Bulan 1.493.083

	Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN	
2024	Desember	1.493.084	
2025	Januari	1.493.084	
	Februari	1.493.084	
	Maret	1.493.084	
	April	1.493.083	
	Mei	1.493.083	
	Juni	1.493.083	
	Juli	1.493.083	
	Agustus	1.493.083	
	September	1.493.083	
	Oktober	1.493.083	2.986.166
	November	1.493.083	
	Berakhir November 2024	17.917.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.072
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

✓	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.072	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	174.921.875	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		174.921.875

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Kantin dan Toserba oleh Koperasi Konstitusi untuk periode Oktober 2025 s.d. Desember 2026 sebesar Rp174.921.875,- (279.875.000-(9/24*279.875.000))

Dibuat : Allita Prisantama oleh : 199501292018012001 NIP Tanggal : 1 Juli 2025	Disetujui oleh : Endrizal NIP : 197505232006041003 Tanggal : 1 Juli 2025	Direkam : Afrianto Amri oleh : 198404152018011001 NIP Tanggal : 1 Juli 2025
---	--	--



**Sewa Ruang Koperasi Konstitusi (Basement I - Toserba & Kantin) selama 2 Tahun
(1 Januari 2025 - 31 Desember 2026)**

Tarif Sewa 2 Tahun/24 Bulan **279.875.000**
Tarif Sewa Per Bulan 11.661.458

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025	139.937.500
Tahun 2026	139.937.500
Berakhir 31 Desember 2026	279.875.000

174.921.875



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.073
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

√	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.073	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.360.000	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		31.360.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima di muka Sewa Lapangan Tennis Bekasi oleh Koperasi Konstitutusi untuk periode 1 Oktober 2025 sd 31 Mei 2027 sebesar Rp31.360.000,- (37.632.000-(4/24*37.632.000))

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Sewa Lapangan Tennis Bekasi oleh Koperasi Konstitusi selama 2 tahun (1 Juni 2025 s.d. 31 Mei 2027)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan) **37.632.000**

Tarif Sewa Per Bulan 1.568.000

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
Tahun 2025 (Juni - Desember)	10.976.000
Tahun 2026 (Januari - Desember)	18.816.000
Tahun 2027 (Januari - Mei)	7.840.000
Berakhir 31 Mei 2027	37.632.000

31.360.000



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.080
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

√	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.080	D	425131	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	22.000.000	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		22.000.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima di muka Sewa Peralatan dan Mesin berupa Kontainer oleh Koperasi Konstitutusi untuk periode 1 Oktober 2025 sd 31 Juli 2027 sebesar Rp22.000.000,- $(24.000.000 - (2/24 * 24.000.000))$

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



Sewa Peralatan dan Mesin berupa Kontainer oleh Koperasi Konstitusi selama 2 tahun (1 Agustus 2025 s.d. 31 Juli 2027)

Tarif Sewa 2 Tahun (24 bulan)	24.000.000
Tarif Sewa Per Bulan	1.000.000

Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN	
Tahun 2025 (Agustus - Desember)	5.000.000	
Tahun 2026 (Januari - Desember)	12.000.000	
Tahun 2027 (Januari - Juli)	7.000.000	22.000.000
Berakhir 31 Mei 2027	24.000.000	



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (077) Mahkamah Konstitusi RI
 Eselon I : (01) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 Wilayah : (0151) Kota Jakarta Pusat
 Satuan Kerja : (653910) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
 No. Dokumen Modul GLP : JP.081
 Dokumen Pendukung :
 Tanggal : 30 September 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal balik

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

√	Pendapatan Diterima Di Muka		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Masuk
	Belanja Dibayar Di Muka		Transfer Keluar
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Koreksi Beban Aset
	Penyisihan Piutang		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penghapusan Piutang		Kas Lainnya di BLU
	Penyusutan Aset		Uang Muka Belanja
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Perolehan Aset
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Koreksi Piutang/Utang
	Persediaan		Hibah Langsung
	Koreksi Antar Beban		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		Penyesuaian Neraca
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Jurnal Umum
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
JP.081	D	425131	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	54.689.000	
	K	219211	Pendapatan sewa diterima dimuka		54.689.000

Keterangan:

Jurnal penyesuaian atas sisa pendapatan diterima dimuka Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI untuk Periode Desember 2025 s.d. November 2028 sebesar Rp54.689.000,-

Dibuat oleh : Allita Prisantama	Disetujui oleh : Endrizal	Direkam oleh : Afrianto Amri
NIP : 199501292018012001	NIP : 197505232006041003	NIP : 198404152018011001
Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025	Tanggal : 30 September 2025



**Sewa Sebagian Tanah pada Rumah Jabatan MK oleh PT. BRI Kantor
Cabang Bekasi selama 3 tahun (Desember 2025 - November 2028)**

36 Tarif Sewa 36 Bulan **54.689.000**
Tarif Sewa Per Bulan 1.519.138

	Tahun	BIAYA SEWA PER BULAN
2025	Desember	1.519.139
2026	Januari - Desember	18.229.656
2027	Januari - Desember	18.229.656
2028	Januari - November	16.710.529
	Berakhir November 2024	54.688.980



Visi
Tegaknya Konstitusi
melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka

Misi
1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan
Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara
Negara dan Warga Negara
2. Memperkuat Independensi dan
Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

